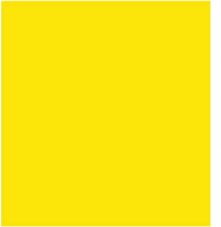


NYALA ASA PEREMPUAN BERDAYA DI NUSA TENGGARA

Risalah Proyek
Indonesian Women in Leadership (I-WIL)
NTB dan NTT 2018-2023



NYALA ASA PEREMPUAN BERDAYA DI NUSA TENGGARA

Risalah Proyek
Indonesian Women in Leadership (I-WIL)
NTB dan NTT, 2018-2023

Oxfam di Indonesia telah bekerja sejak tahun 1957 bermitra dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan melalui program keadilan ekonomi, keadilan gender, dan pemenuhan hak di masa krisis dan bencana. Isi dokumen ini tidak mencerminkan pendapat dan nilai-nilai Kementerian Sosial.

Kata Pengantar Direktur Oxfam di Indonesia

Proyek Indonesian Women in Leadership (I WIL) merupakan sebuah upaya dan kerja keras luar biasa yang dilakukan oleh para tim proyek bersama mitra di lapangan: Konsorsium Timor Adil dan Setara (KTAS), Konsorsium ADARA, Kalyanamitra, serta orang-orang yang bekerja dengan kami. Saya yakin bahwa sinergi yang telah dilakukan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat, khususnya 20.910 orang perempuan, anak perempuan bahkan laki-laki di Indonesia Timur. Sejak awal proyek dilaksanakan, misi kami untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender menjadi penggerak dan semangat dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Dengan bangga dan penuh kerendahan hati saya berterima kasih atas kemajuan dan kemenangan yang telah dicapai tim I WIL selama lima tahun terakhir. Kami berharap hal ini dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi kerja-kerja pembangunan di tanah air dan menjadi pelengkap bagi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial.

Melalui program dan kegiatannya, proyek I WIL berfokus pada tiga pilar, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kekerasan Berbasis Gender (GBV), dan Perempuan dalam Kepemimpinan di 21 desa di dua provinsi di Indonesia: Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di bawah pilar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, mitra kami bekerja dengan pemerintah daerah dan orang-orang yang bekerja dengan kami untuk memberikan lebih banyak peluang dan ruang bagi perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih penuh dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga. Dalam upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, melalui pilar Kekerasan Berbasis Gender (KBG), para *champion* I WIL dan paralegal bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa perempuan dan Penyandang Disabilitas (PwD) mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan para pelaku Kekerasan Berbasis Gender dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang tak kalah

pentingnya, untuk mempromosikan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan keterwakilan perempuan dalam masyarakat, di bawah pilar Perempuan dalam Kepemimpinan, tim I WIL juga berkolaborasi untuk membuka ruang di masyarakat di mana suara perempuan didengar, dan kontribusi mereka diakui.

Perjalanan tidak selalu mulus, dengan penolakan masyarakat di awal proyek dan pandemi COVID-19 yang melanda, tim I WIL tim menghadapi beberapa tantangan dan hambatan selama masa proyek. Namun, ketekunan dan kegigihan adalah api abadi yang menyulut proyek I WIL menuju kesuksesan dan pencapaiannya. Proyek ini akhirnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah dan telah menginspirasi orang-orang yang terlibat dalam proyek untuk melanjutkan kerja-kerja baik yang telah dilakukan oleh I WIL.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan hebat yang telah dilakukan oleh tim I WIL selama lima tahun terakhir mungkin tidak dapat diceritakan secara penuh dalam 70 halaman, namun saya yakin cerita perubahan yang dituangkan dalam buku ini akan membuat Anda dan

para pembaca lainnya terbenam dalam kisah-kisah luar biasa serta pencapaian dalam perjalanan I WIL.

Terakhir, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih pribadi saya sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota tim dan mitra kami atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen mereka terhadap proyek ini. Tanpa upaya mereka, proyek ini tidak akan mungkin terjadi. Oxfam juga berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh donor kami, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kementerian Sosial Indonesia, serta pemerintah daerah yang telah mendukung proyek ini sehingga proyek ini terealisasi dengan baik. Kami berharap agar kerja sama yang telah dipupuk melalui proyek I WIL dapat terus dilanjutkan guna memajukan kesetaraan gender di hari ini hingga di masa depan.

Salam hangat,

Maria Lauranti

Direktur Oxfam di Indonesia

DAFTAR ISI

Saat I WIL Menembus Sekat dan Melampaui Keterbatasan	1
Pilar I: Upaya Menghapus Kekerasan Berbasis Gender	6
• Merangkul Kawan Menapaki Jalan Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan	7
• Meretas Kekerasan Berbasis Gender dengan Melibatkan Masyarakat	13
• Sosok-sosok inspiratif: Bersama-sama Mengambil Peran dalam Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan	18
Pilar II: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	28
• Perempuan Berdaya Membangkitkan Ekonomi Bersama	29
• Mengatasi Kendala Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	34
• Sosok-sosok inspiratif: Para Perempuan Penghasil Emas	39
Pilar III: Mendorong Kepemimpinan Perempuan	47
• Perempuan Tidak Lagi Duduk Diam di Kursi Belakang	48
• Mengakui Kepemimpinan Perempuan di Berbagai Sektor Kehidupan	52
• Sosok-sosok inspiratif: Bangkit Memimpin dari Keterpurukan	57
Menguatkan Keberlanjutan untuk Menata Langkah Selanjutnya	64
Pesan dari Mitra	69

DAFTAR SINGKATAN

ADARA: Adil Damai dan Setara (nama konsorsium)

ADD: Alokasi Dana Desa

Admindak: Administrasi Kependudukan

APBDes: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ASEAN: Association of Southeast Asian Nation (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

BPD: Badan Permusyawaratan Desa

BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BUMDes: Badan Usaha Milik Desa

Dekranasda: Dewan Kerajinan Nasional Daerah

DFAT: Department of Foreign Affairs and Trade (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia)

Dinsos: Dinas Sosial

Dinkopnakertrans: Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dindikcapil: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

FGD: Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah)

HWDI: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

IJM: Ingkar Janji Menikah

INFID: International NGO Forum on Indonesian Development

IPG: Indeks Pemberdayaan Gender

IPM: Indeks Pembangunan Manusia

Kadus: Kepala Dusun

KBG: Kekerasan Berbasis Gender

KPKK: Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif

KTP: Kartu Tanda Penduduk

LBH: Lembaga Bantuan Hukum

Musrenbangdes: Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

Musdes: Musyawarah Desa

Musdus: Musyawarah Dusun

NTB: Nusa Tenggara Barat

NTT: Nusa Tenggara Timur

PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini

P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pemdes: Pemerintah Desa

Pemkab: Pemerintah Kabupaten

Perda PPA: Peraturan Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak

Perdes PPA: Peraturan Desa
Perlindungan Perempuan dan Anak

PKK: Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga

PPA: Pusat Pengembangan Anak

Renstra: Rencana Strategis

RKPDes: Rencana Kerja Pembangunan
Desa

RPJMDes: Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa

RT: Rukun Tetangga

RW: Rukun Warga

SDGs: *Sustainable Development Goals*
(*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*)

SD: Sekolah Dasar

SK: Surat Keputusan

SOP: Standar Operasional Prosedur

TAS: Timor Adil dan Setara (nama
konsorsium)

UMKM: Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UPTD PPA: Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak

YABIKU NTT: Yayasan Amnaut Bife
"Kuan" Nusa Tenggara Timur

SAAT I WIL MENEMBUS SEKAT DAN MELAMPAUI KETERBATASAN

Bila melihat indeks terkait kesetaraan gender di Indonesia, kita memang belum bisa tersenyum. The Global Gender Gap Index 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 92 dari 146 negara dengan skor 0,697 yang berarti baru tercapai 69,7 persen. Indonesia masih di bawah Filipina, Laos, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. Data BPS 2021 pun masih menempatkan 25 provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kategori menengah rendah dan rendah. Itulah mengapa mengubah perilaku pada isu pemberdayaan perempuan tidaklah mudah, sebab tak jarang berkelindan dengan belitan adat dan paradigma yang mengakar. Akhirnya beragam program pemberdayaan perempuan pun lebih banyak di permukaan dan parsial.

Pada konteks inilah proyek Indonesian Women in Leadership (I WIL) hadir. Proyek Oxfam di Indonesia ini dijalankan di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang termasuk kategori IPG menengah dan menengah rendah. Proyek ini dilakukan pada kurun 2018-2023 dengan ruang lingkup penguatan kepemimpinan perempuan yang memiliki kerentanan sosial ekonomi dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Wilayah di NTT meliputi enam desa di Kabupaten Kupang (Oelomin, Tunfeu, Niukbaun, Nekbaun, Oebelo dan Oesena); empat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Ajaobaki, Biloto, Oeekam, Oelet); dan dua desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (Kuanek, Maubesi). Sedangkan di NTB mencakup tiga desa di Kabupaten Lombok Timur (Jurit Baru, Pringgasela Selatan, Beririjarak) serta enam desa di Kabupaten Lombok Tengah (Sukarara, Batu Tulis, Nyerot, Pemepek, Pagutan, Ubung)

Oxfam bersama mitranya, yaitu Konsorsium Timor Adil dan Setara (KTAS) untuk wilayah NTT dan Konsorsium Adil Damai dan Setara (ADARA) untuk NTB, merancang proyek ini dengan pendekatan yang menyeluruh, melalui tiga pilar yang digarap secara simultan untuk mencapai target perubahan perilaku sekaligus dampak nyata di wilayah itu. Pilar tersebut adalah penghapusan kekerasan berbasis gender (*gender based violence elimination*), pemberdayaan ekonomi perempuan (*women economic empowerment*), dan kepemimpinan perempuan (*women leadership*)

Beranggotakan LSM-LSM lokal, kedua konsorsium itulah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek. Sedangkan mitra ketiga, Yayasan

Kalyanamitra, lebih berperan dalam melatih pemerintah desa untuk mampu memantau, mencatat, dan melaporkan capaian SDGs desa dan mengangkat praktik-praktik baik dari proyek I WIL ke forum nasional dan ASEAN.

Tiga pilar berbuah nilai tambah

Menargetkan perubahan perilaku mesti diawali tahap perubahan pengetahuan dan kemudian perubahan sikap. Itu tecermin pada target di masing-masing pilar. Target pilar penghapusan *gender based violence* adalah perempuan, laki-laki, dan jaringan komunitas melakukan aksi bersama untuk mengubah norma sosial yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender. Pilar *women economic empowerment* ingin mewujudkan perempuan dan anak muda perempuan berdaya melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan bisnis inklusif. Sedangkan pilar *women leadership* menargetkan semakin banyak perempuan dan anak muda perempuan yang mempunyai akses dan kontrol yang lebih besar terhadap kepemimpinan sosial, politik dan sumber daya ekonomi.

I WIL memiliki tiga nilai tambah. Pertama, pendekatan komprehensif tiga pilar menjadikan I WIL berbeda dibandingkan dengan program serupa, karena terbukti isu kekerasan terhadap perempuan, keberdayaan perempuan dalam ekonomi dan kepemimpinan perempuan saling terkait dan

memengaruhi. Kedua, wadah layanan berbasis komunitas yaitu paralegal dan kelompok *women economic empowerment* yang menjadi jembatan bagi komunitas untuk mengakses lembaga dan layanan formal. Ketiga, keterlibatan aktif aktor-aktor lokal kunci seperti pemerintah desa, tokoh adat dan agama yang sangat strategis dalam memperkuat kebijakan dan praktik.

Strategi merangkul tokoh

Ketiga nilai tambah itu mewujud dalam capaian proyek selama lima tahun perjalanannya. Pada pilar penghapusan *gender based violence*, layanan keadilan berbasis komunitas di wilayah proyek menjadi semakin baik antara lain dengan terbangunnya mekanisme pelaporan berbasis komunitas yang efektif melalui paralegal. Paralegal yang tidak hanya berasal dari warga biasa tapi juga tokoh adat dan pemerintahan ini ternyata meningkatkan kesadaran dan kepercayaan komunitas, terlihat dari jumlah laporan kasus yang naik 25 persen dalam 2 tahun terakhir proyek. Saat ini ada 147 paralegal dan lebih dari 130 tokoh adat dan agama yang aktif mendukung pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Keberhasilan strategi merangkul para tokoh lokal ini berdampak pada keberpihakan kebijakan. Sebut saja Peraturan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (Perdes PPA) yang terintegrasi dengan hukum adat hingga legalisasi paralegal melalui

penerbitan Surat Keputusan di 19 dari 21 desa wilayah proyek. Artinya telah terjadi perubahan nilai, praktik, dan sistem masyarakat untuk mencegah, menangani, dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Di sisi lain, menguatnya posisi perempuan yang terlibat I WIL dibarengi perubahan perilaku para suami yang bersedia mengerjakan pekerjaan domestik. Pelibatan laki-laki ini juga menjadi keunikan I WIL yang mematahkan stigma bahwa program berbasis gender hanya melibatkan perempuan. Hasilnya adalah perubahan perilaku yang tidak sekadar individual melainkan bersifat komunal dan sistemis.

Dampak tak terduga

Menguatnya posisi tawar perempuan yang terlibat I WIL menjadi capaian di pilar *women economic empowerment*. Mereka memiliki peran lebih kuat dalam keluarga misalnya dalam mengelola perencanaan keuangan. Lebih dari itu, para perempuan ini telah melangkah jauh melebihi bayangan siapa pun. Siapa menyangka produk mereka menjadi bagian dari gelaran kelas dunia World Super Bike di Sirkuit Mandalika bahkan dipasarkan hingga Kamboja?

Berbagai pihak pun menyambut inisiatif para perempuan inovatif tersebut. Muncullah kemudian desa-desa rintisan bisnis inklusif. Pemerintah desa hingga provinsi maupun sektor swasta pun berkomitmen mendukung

pengembangan mereka dan membuka jalur-jalur pemasaran.

Beragam pelatihan dan pendampingan yang diterima kelompok perempuan yang terlibat I WIL memang berdampak pada keterampilan dan kepercayaan diri mereka menghadapi pihak-pihak itu. Tak kurang dari 21 kelompok perempuan di NTT & NTB telah dilatih dan dibantu mengakses peluang modal, pasar, dan legalitas.

Para perempuan itu mampu mengorganisasi pertemuan sampai menyiapkan proposal untuk diajukan dalam pertemuan desa. Jumlah perempuan yang mengikuti pertemuan formal meningkat pesat, demikian juga dengan inisiatif pengajuan usulan baik pada forum musyawarah dusun, musyawarah desa, dan lainnya.

Tentu inisiatif itu tidak bisa serta merta terlihat hasilnya, namun perkembangannya terbilang baik. Misalnya ada 3 desa di NTT yang membangun akses air bersih baru yang dapat mengurangi beban waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan perempuan.

Selain yang telah dirancang di awal proyek, I WIL juga membawa perubahan di bidang yang tak terduga, yaitu disabilitas. Tantangan yang ditemui di lapangan membawa ide dan semangat inklusif untuk menjangkau kelompok disabilitas yang memang rentan. Dimulai dengan membentuk posko pengaduan khusus untuk penyandang disabilitas dan melatih

paralegal penyanggand disabilitas. Upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan dilakukan di tahun ke-5, setelah bekerja sama dengan HWDI NTB untuk mendata jumlah penyanggand disabilitas di 9 desa di NTB. Kemudian konsorsium ADARA bekerja sama dengan Disdukcapil Lotim dan Loteng untuk pemenuhan hak adminduk ini.

SDGs Desa

Tidak hanya itu, sebanyak 5 dari 21 desa I WIL dijadikan contoh praktik baik capaian SDGs Desa yang ditulis dalam buku/laporan yang berjudul “Praktik Baik SDGs Desa, Studi Kesetaraan Gender, Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa” yang disusun oleh Kalyanamitra dan INFID. Buku ini diserahkan ke Kemendes dan Bappenas, pada 2022 lalu. Lima desa yang menjadi contoh praktik baik adalah Batutulis, Pringgasela Selatan, Ajaobaki, Kuanek dan Oesena.

“Konsorsium sangat membantu dalam penyampaian pilar-pilar SDGs. Terutama pilar ke 1, 5 dan 8. Kami betul-betul merasakan Konsorsium ADARA bisa memaksimalkan peran kami mencapai pilar tersebut. Baik itu untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan terhadap perempuan,” kata Sekdes Sukarara Zainal Rahman.

“Capaian SDGs, kami fokus di sini untuk yang poin 1,5,8. Kalau kemiskinan, karena *mindset*. Yang kami sosialisasikan bersama teman-teman konsorsium adalah ada upaya

peningkatan ekonomi yang bisa dilakukan warga, yaitu ternak unggas. Sekarang sebagai hasilnya rata-rata bisa untuk biaya sekolah bahkan kuliah. Jadi sudah berjalan sebagai SDGs kami yang kemiskinan,” kata Muhsin, Kepala Desa Batutulis.

Menurut Listyowati Ketua Kalyanamitra, capaian di poin 1, 5 dan 8 SDGs berkontribusi pada poin lainnya. Dan apa yang telah dicapai oleh desa-desa I WIL berdampak besar terhadap pelaporan di tingkat nasional alias tidak berdiri sendiri.

“Pada 2022 misalnya, kami terlibat dalam ASEAN People Forum di Kamboja yang dihadiri juga oleh Konsorsium ADARA dan TAS. Di situ proses *sharing* terjadi, terkait dengan proses dalam I WIL yang ternyata sejalan maupun dapat dipelajari oleh negara lain. Jadi yang terjadi secara lokal dapat berdampak hingga regional,” katanya.

I WIL telah banyak berkontribusi pada perubahan mendasar dalam konteks kesetaraan hak perempuan meski baru diterapkan di 21 desa. Angin perubahan itu sudah mulai bertiup dan perlahan akan menyapu wajah lama NTB dan NTT yang kusam oleh tingginya kekerasan dan ketidakadilan lainnya terhadap perempuan, menjadi paras bercahaya para perempuan yang berdaya dan berjuang dengan setara dan penuh percaya diri bersama para laki-laki. Berjuang demi Indonesia yang lebih bermartabat.

The image features a dark purple background with several overlapping, semi-transparent shapes in shades of purple, pink, orange, and red. A prominent light green rounded rectangle is centered horizontally and contains the text 'PILAR I' in white, bold, uppercase letters.

PILAR I

UPAYA MENGHAPUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

Upaya untuk menghapus kekerasan berbasis gender (*gender-based violence elimination*) merupakan pilar pertama program I WIL. Melalui pilar ini, perempuan, laki-laki, dan jaringan komunitas didorong untuk melakukan aksi bersama guna mengubah norma sosial yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender yang lebih banyak menimpa perempuan dan anak-anak. Pelibatan berbagai pihak ini menjadi langkah yang sangat strategis karena kekerasan berbasis gender merupakan isu yang kompleks. Budaya patriarki yang mengakar di masyarakat menjadi tantangan terbesar. Masyarakat menganggap perempuan sebagai sosok yang lebih rendah sehingga pantas untuk dipukul dan disiksa. Perempuan juga dianggap punya tugas menjaga anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga tidak mendapat cukup ruang berekspresi di luar. Hal itu membuat perempuan menjadi tergantung

secara ekonomi, dan lebih lanjut membuat perempuan menginternalisasi pandangan masyarakat bahwa dirinya tidak kompeten dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh perempuan. Tiga tulisan berikut menggambarkan bagaimana upaya pelibatan berbagai pihak itu berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal itu antara lain dilakukan melalui pembentukan paralegal, yakni seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun bukan seorang pengacara profesional dan dengan keterampilan hukumnya itu bisa membantu masyarakat. Upaya lainnya adalah melalui pembentukan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, serta pelibatan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam menangani serta mengurangi kasus kekerasan berbasis gender.

Merangkul Kawan Menapaki Jalan Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan

Facts are stubborn, statistics are more pliable, begitu konon ungkapan penulis legendaris Mark Twain. Angka yang terlihat belum tentu menggambarkan kenyataan. Begitulah situasi awal saat Konsorsium ADARA membuka jalan implementasi pilar penghapusan *gender based violence* di NTB. Sebab data kasus kekerasan terhadap perempuan di sembilan desa calon lokasi proyek I WIL sangat rendah bahkan nyaris nihil.

“Angkanya rendah karena banyak masyarakat cenderung menutupi kasus yang terjadi, dianggap aib. Kalau ada yang melaporkan, akan dikucilkan karena dianggap tidak tahu adat dan agama, atau melangkahi pemerintah desa,” kata Ardian Pebriyanto Adi, Gender Based Violence Elimination Specialist Konsorsium ADARA.

Padahal, lanjutnya, setelah ditelusuri oleh tim konsorsium banyak terungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama.

Namun, tidak banyak warga yang menganggapnya sebagai masalah saking terbiasanya menyaksikan, mengalami atau malah melakukan.



Ardian Pebriyanto Adi, Gender Based Violence Elimination Specialist Konsorsium ADARA (Gama/Oxfam di Indonesia)

“Justru di situlah fatalnya, yaitu ketika warga tidak lagi menganggapnya sebagai masalah padahal banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak dulu, kayak pemandangan sehari-hari,” ujar Muhammad Juaini, Koordinator Konsorsium ADARA.

Indrawati, Koordinator Peningkatan Kapasitas Perempuan di Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif (KPKK) Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur membenarkan hal tersebut. Sebelumnya dia pun

menganggap situasi tidak adil yang dialami perempuan adalah hal lumrah karena begitulah yang dia lihat dan alami.

“Ternyata yang kita anggap biasa-biasa saja itu adalah keterpurukan,” katanya.

Data resmi yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mencatat 959 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2021, melonjak dibandingkan tahun 2022 sebanyak 845 kasus. Bila merujuk observasi dan asesmen Konsorsium ADARA, lonjakan itu masih jauh di bawah angka sesungguhnya.

Pemahaman dan penerapan adat sering dianggap sebagai salah satu penyebab pelik dan mengakarnya persoalan ini. Salah satu yang disorot di NTB adalah praktik *merariq*, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan cara “mencuri” perempuan dan dibawa ke tempat laki-laki. Dalam *merariq*, berapa pun usia perempuan, termasuk bila masih tergolong usia anak, secara adat harus dinikahkan. Itulah mengapa hampir setiap bulan terjadi pernikahan anak di wilayah itu.

“Sistem perkawinan secara adat yang ada di Lombok ini dengan dicuri atau dilarikan. Menjadi aib ketika perempuan yang sudah dibawa lari pihak laki-laki lalu dikembalikan ke keluarganya. Dianggap pelanggaran adat,” kata Muhammad Yusuf, Ketua Lembaga Adat

Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dampak dari sistem pernikahan ini, terutama bila melibatkan anak, menjalar kemana-mana akibat ketidaksiapan fisik dan psikologis. Mulai dari tingginya kekerasan terhadap perempuan dan perceraian, hingga sulitnya perempuan mengakses layanan kesehatan maupun bantuan pemerintah lainnya.

“Jadi meski secara adat didukung dan dipegang teguh, tetapi berbenturan dengan hukum negara. Mereka belum cukup umur untuk membuat KTP, Kartu Keluarga, dan buku nikah yang berarti tidak bisa ikut BPJS,” lanjut Yusuf yang juga menjabat Kepala Dusun Dasan Baru, Desa Sukarara.

Posisi Yusuf memang unik karena berdiri sebagai representasi adat sekaligus pemerintah desa. Setelah terlibat proses I WIL, dia kemudian intens mengampanyekan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan bahkan menjadi paralegal. Upaya merangkul tokoh seperti Yusuf inilah yang membuat proses di pilar penghapusan *gender based violence* mulai berbalik arah.

Titik balik

Pada dua tahun proses sosialisasi awal, tim konsorsium terbentur sana sini dan salah satu yang paling keras adalah dengan pemuka adat. Alih-alih terus berlawanan, tim memutuskan mengubah

strategi dengan menjadikan para tokoh masyarakat termasuk aparat pemerintah desa sebagai kawan.

“Ini karena belum sama pemahamannya. Jadi kami pelan-pelan menyatukan pemahaman dengan para tokoh. Ketika akhirnya tercapai, mereka yang malah aktif meneruskan pemahaman yang benar pada warga,” tambah Juaini.

Dampak positifnya mulai terlihat memasuki tahun ketiga proyek. Penguatan kapasitas melalui rangkaian pelatihan, diskusi hingga komunikasi intensif berbuah perubahan pemahaman terhadap situasi perempuan. Pemahaman baru warga yang terlibat I WIL lantas ditularkan melalui pengajian, pertemuan warga hingga acara adat.

“Kalau dulu, kami di kampung sini *nggak* mungkin ikut duduk apalagi sampai menyampaikan ide. Sekarang kami bahkan ikut menyosialisasikan bahwa boleh kok perempuan bilang *nggak* usah, *nggak* mau. Cuma memang ada porsinya. Jadi, perempuan sini sekarang sudah berani mengatakan *nggak* kalau mendapat kata-kata kasar. Kalau ada yang main tangan, itu sudah *nggak* ada toleransinya lagi. Pasti lapor ke posko,” kata Baiq Anggita Silvia, paralegal dari Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Setelah mengikuti beragam pelatihan, para perempuan yang terlibat dalam kegiatan I WIL benar-benar menjadi motor penggerak kampanye perubahan pengetahuan, sikap, bahkan perilaku. Para perempuan ini menjadi agen



Baiq Anggita Silvia, Desa Pagutan (Gama/Oxfam di Indonesia)

perubahan dengan caranya masing-masing.

“Sering dapat cerita dari ibu rumah tangga lain betapa lelahnya mereka. Bahkan ada yang masih harus ke sawah dan urus rumah padahal suaminya pengangguran tapi tidak mau bantu,” kata Indrawati.

Tanpa banyak bicara Indrawati bersama suami memilih cara kampanye dengan memperlihatkan pembagian peran pekerjaan rumah tangga kepada lingkungan sekitar. Suami Indrawati ketika di rumah tidak segan mencuci dan menjemur baju hingga menyapu halaman. Hal yang terlihat sederhana itu terbukti efektif mengubah perspektif pasangan suami istri lain.

Pelibatan laki-laki dalam pilar Penghapusan *Gender Based Violence* |

WIL memang menjadi kunci berikutnya dalam membuka ruang kesadaran tentang kesetaraan. Susi Herawati, Project Manager Program I WIL Oxfam di Indonesia mengatakan bahwa pelibatan laki-laki sebagai *supporting system* itulah yang tidak ada di program lain di Oxfam.

“Dengan melibatkan dan mengubah *mindset* laki-laki, perempuan jadi memiliki lebih banyak waktu untuk bisa bersosialisasi dengan sesama perempuan dan juga mendapatkan ruang dalam kegiatan-kegiatan di desa. Perempuan jadi lebih percaya diri dalam aktivitas pemberdayaan,” katanya.

Zulfikar, guru SD sekaligus penghulu di Desa Sukarara membenarkan perubahan dalam dirinya usai mengikuti program Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender di proyek I WIL. Dia mulai mau berbagi peran dengan istrinya secara setara dan berupaya menyebarkan pemahaman itu melalui perilaku saat di lingkungan pekerjaan maupun rumah.

Penanganan dan pemulihan

Setelah melewati tahap pemahaman, tim konsorsium mulai ke tahap penanganan. Butuh orang-orang yang dipercaya warga yang sekaligus dapat menangani laporan kekerasan secara sistematis sesuai standar.

“Maka ujung tombaknya adalah paralegal desa. Perempuan, tokoh masyarakat dan laki-laki baru dilatih untuk menjadi paralegal. Mulai



Zulfikar, Peserta Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, di Desa Sukarara. (Gama/Oxfam di Indonesia)

dari menerima pengaduan sampai keliling untuk menemukan kejadian kekerasan, sehingga sekaligus sebagai pencegahan. Mereka juga punya posko pengaduan,” jelas Juaini.

Paralegal desa menjadi capaian luar biasa di pilar Penghapusan *Gender Based Violence*. Tercatat sampai dengan akhir 2022, sudah 147 paralegal yang tersebar di seluruh wilayah I WIL. Dampak yang dibawanya begitu massif mulai dari pola pikir yang berubah, meningkatnya keberanian warga melaporkan tindak kekerasan, hingga munculnya tingkat kepercayaan pemerintah desa.

“Paralegal di sini *ngantor*-nya ya di kantor desa. Ada plang di depan. Kami kasih akses langsung ke masyarakat termasuk untuk mediasi. Berkat I WIL, kami sudah punya alur untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali masalah yang sudah kami selesaikan bersama teman-teman konsorsium dan paralegal,” kata Muhsin, Kepala Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Muhsin
Kepala Desa
Batutulis
(Gama/Oxfam
di Indonesia)



Anggita pun mengakui bahwa di desanya, kepala desa selalu mengutus staf untuk datang setiap kali ada mediasi kasus. Bahkan tak jarang kepala desa sendiri yang datang ikut membantu penyelesaian.

Keberadaan paralegal dilegitimasi pemerintah desa dengan menerbitkan SK Kepala Desa. Seluruh desa wilayah I WIL di NTB telah memiliki surat keputusan untuk menjamin legalitas kerja-kerja paralegal sekaligus menjadi pijakan keberlanjutan di masa mendatang termasuk terkait anggaran operasional.

Perjalanan panjang pilar Penghapusan *Gender Based Violence* di NTB juga berujung pada selarasnya hukum negara dengan adat. Raihan yang sangat penting mengingat faktor adatlah yang selama ini dianggap membelenggu

kesadaran tentang kesetaraan.

“Kami telah mengeluarkan peraturan desa yang merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Bahkan dalam adat istiadat yang sekarang, perkawinan usia anak sudah termasuk salah satu pelanggaran *salak waye*. Kebetulan saya mengikuti *sangkep* atau Majelis Besar Sasak di Lombok Tengah yang kemarin memasukkan poin itu,” kata Yusuf.

Sedangkan terkait dengan tahap pemulihan, konsorsium mendorong komunitas untuk merujuk ke Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. UPTD PPA inilah yang akan membantu menghubungkan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan beragam layanan pemulihan.

Ruang bagi disabilitas

Meski menghadapi beragam tantangan, memasuki paruh akhir justru proyek ini menghadirkan dampak yang tidak terencana sebelumnya yaitu pelayanan bagi kelompok disabilitas. Menurut Juaini, awalnya tim konsorsium mengalami kendala saat membantu penanganan kasus dengan korban perempuan penyandang disabilitas. Lalu mulailah tim konsorsium melatih paralegal disabilitas dengan menggandeng HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) NTB.

Selama proses pelatihan, tim konsorsium menyadari banyaknya persoalan dasar sebagai akar kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas.



Wildan,
Sekdes Jurit
Baru. (Gama/
Oxfam di
Indonesia)

ada misalnya terkait ketiadaan alat transportasi. Pasti ada jalan,” katanya

Memang banyak rasa syukur yang menyeruak di saat I WIL menapaki ujung jalan akhir proyek, terutama di pilar Penghapusan *Gender Based Violence* yang terasa sangat berat di awal perjalanan. Pancaran semangat berbaur dengan harapan mengapung di udara sembilan desa saat menatap masa depan nan mandiri. Helaan napas lega para warga yang terwakili dalam kalimat Wildan, Sekretaris Desa Jurit Baru.

“Ternyata indah ketika kita menghargai perempuan.”

Bersama HWDI NTB, pemerintah desa, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur dan Lombok Tengah, mereka mulai melakukan pendataan disabilitas di sembilan desa lokasi proyek, yang berujung pada pelatihan paralegal dan upaya memfasilitasi hak adminduk.

Nur Baeni, paralegal disabilitas sekaligus anggota HWDI NTB, mengungkapkan bahwa menjadi paralegal adalah jawaban dari panggilan jiwanya. Sebelumnya ketika mengetahui teman-teman penyandang disabilitasnya mengalami kekerasan, Nur bingung apa yang harus dilakukan termasuk harus lapor ke mana.

“Saya bersyukur bisa menjadi paralegal, sekarang jalannya sudah ada. Saya berkomitmen penuh. Hambatan pasti

Meretas Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dengan Melibatkan Masyarakat

Kehadiran paralegal di Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menekan kasus kekerasan berbasis gender di desa tersebut setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Selain itu, korban kekerasan berbasis gender yang mayoritas adalah perempuan kini memiliki tempat untuk mengadu.

Apa yang terjadi di Desa Maubesi ini berbeda dengan tren kasus kekerasan di wilayah NTT. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada 2022 mencapai 287 kasus, dengan rincian 152 kasus menimpa perempuan dewasa, dan 135 kasus terjadi pada anak di bawah umur. Jumlah ini naik dibandingkan sebelumnya.

Venidora Naisaban atau Mama Veni yang merupakan salah satu paralegal di Desa Maubesi mengatakan, saat dirinya mengikuti pelatihan untuk menjadi paralegal pada 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan di desanya terbilang tinggi. Dengan hadirnya paralegal seperti dirinya dan sejumlah warga lain, jumlah kasus mulai berkurang. “Kalau sebut paralegal

itu mereka (pelaku) takut. Korban lapor, kami langsung tangkap pelaku,” katanya.

Pelatihan menjadi paralegal itu merupakan bagian dari program I WIL yang dilakukan Oxfam di Indonesia bekerja sama dengan Konsorsium Timor Adil dan Setara (TAS). Koordinator Konsorsium TAS Ansy Damaris mengatakan, sebelum program I WIL dimulai, di NTT banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan berbasis gender. Akibatnya, banyak korban yang diam. Di sisi lain, ada budaya yang membentuk pola pikir bahwa perempuan harus menjaga nama baik keluarga. Ketika ada kasus kekerasan seksual di dalam keluarga, misalnya yang dilakukan laki-laki dewasa terhadap anak, hal itu tidak dilaporkan karena dianggap akan membuka aib keluarga. “Anak sudah menjadi korban, istri juga, tapi mereka tidak berdaya untuk menyuarakan itu,” katanya.

Ia mengatakan, menurunkan angka kasus kekerasan berbasis gender bukanlah hal yang mudah. Tetapi, program I WIL telah membuka cakrawala masyarakat. Kini mereka berani berbicara tentang kekerasan yang mereka alami. “Terbukti mereka bisa melaporkan kasus mereka kepada



Venidora Naisaban dan Vincensius Sobe. (Gama/Oxfam di Indonesia)

paralegal atau Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat desa,” katanya.

Kepala Desa Maubesi Vincensius Fomeni mengamini hal itu. Dulu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desanya cukup sering terjadi. Di dalam keluarga, banyak istri yang dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Perempuan juga dipandang harus fokus mengurus rumah sehingga sulit mengembangkan potensinya. Setelah adanya program I WIL, ada perubahan yang dirasakan.

Mengurai adat, melibatkan masyarakat

Apa yang diungkapkan Kepala Desa Maubesi tersebut menggambarkan kompleksitas masalah terkait kekerasan berbasis gender. Selain disebabkan minimnya perlindungan bagi perempuan korban, kekerasan yang dialami tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang sudah mengakar di masyarakat tentang posisi perempuan yang lebih rendah,

tidak berdaya, serta tidak kompeten untuk melakukan hal lain di luar pekerjaan domestik. Oleh karena itu, upaya menghapus kekerasan berbasis gender tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan saja.

Dalam program I WIL, upaya itu dilakukan secara bertahap dengan menasar tiga level perubahan, yakni perubahan di level individu, komunitas dan sistem atau kebijakan. Secara teknis, hal itu dilakukan dengan mendorong perempuan, laki-laki, dan jaringan komunitas untuk melakukan aksi bersama guna mengubah norma sosial yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender.

Pembentukan tim paralegal berbasis komunitas menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Di Desa Maubesi seperti halnya kebanyakan desa lain di NTT, layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender masih minim. Walaupun ada, tidak semua korban bisa mengakses layanan semacam itu. Melalui pembentukan tim paralegal di desa-desa yang menjadi lokasi program I WIL, akses perempuan terhadap

Margarita Seko,
Desa Ajaobaki.
(Gama/Oxfam di Indonesia)



layanan pengaduan dan pendampingan menjadi lebih terbuka.

Mama Veni mengatakan, di desanya ada delapan paralegal yang terdiri dari empat perempuan dan empat laki-laki. Kegiatan utama mereka terutama adalah mendampingi masyarakat yang menjadi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak. Sejauh ini, kasus yang paling sering dihadapinya sebagai paralegal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan ingkar janji menikah.

Tim paralegal untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender juga dibentuk di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Margarita Seko atau Mama Gita adalah salah seorang paralegal di Desa Ajaobaki. Dalam mendampingi korban, Mama Gita biasanya akan mendatangi korban dengan keluarganya untuk melakukan konseling. Jika ternyata kasusnya tidak bisa diselesaikan, kasus tersebut akan dirujuk ke kantor Yayasan Sanggar Suara Perempuan. Namun, kalau kasusnya bisa diselesaikan di desa, hal itu akan diupayakan dengan melibatkan aparat desa, tokoh adat, dan agama. Melalui upaya itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Ajaobaki tidak lagi terlalu menonjol seperti sebelumnya.

Pelibatan laki-laki

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya urusan perempuan, melainkan urusan semua pihak. Untuk itu, laki-laki perlu dilibatkan dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan. Dalam program I WIL, hal itu dilakukan antara lain dengan mengajak



Marnix Bani, Koordinator Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender di Desa Oesena tidak sungkan untuk berbagi tugas domestik dengan istrinya. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Aktivitas pendampingan terhadap korban kekerasan seksual. [Kyo/Oxfam di Indonesia]

laki-laki menjadi paralegal serta menginisiasi pembentukan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender.

Ishak Boenbalan adalah salah satu warga laki-laki yang menjadi paralegal untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender di desanya, yakni Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT. Ia mengaku tertarik menjadi paralegal karena merasa ada tanggung jawab agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desanya tidak menumpuk. Ia telah mendampingi banyak korban kekerasan di desanya. Dalam bekerja sebagai paralegal, ia menjalin komunikasi yang erat dengan pihak pemerintah desa maupun kecamatan, kepolisian, juga gereja.

Hal serupa dialami Vincencius Sobe yang sehari-hari bekerja sebagai staf keamanan di sebuah SMA. Warga Desa Maubesi ini menjadi salah satu laki-laki yang menjadi paralegal bagi kasus kekerasan terhadap perempuan di desanya. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender yang difasilitasi oleh Yayasan Yabiku. Sebagai peserta Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, ia bertugas menyosialisasikan kesetaraan gender di desanya melalui kegiatan posyandu, pertemuan-pertemuan gereja dan desa. Ia mengajak warga

memahami pembagian peran dalam keluarga. Bahwa pekerjaan di rumah bukan hanya tugas istri. Para suami juga bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menimba air, memasak, membawa anak ke posyandu, hingga mengantar anak ke sekolah.

Program Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender juga diadakan di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Marnix Bani selaku Koordinator Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender di Desa Oesena mengatakan, mereka kini beranggotakan 20 orang. Semenjak ada Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak sesering dulu. Sosialisasi yang rutin dilakukan kepada para laki-laki juga membuat perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

Dukungan kebijakan

Program I WIL juga telah mendorong keterlibatan para pemimpin di tingkat lokal. Baik perangkat desa, tokoh adat, hingga pemimpin agama mendukung upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Sejumlah tokoh adat kini secara aktif mempromosikan kesetaraan gender. Sementara para pemimpin lokal di sejumlah desa, misalnya, telah

membuat kebijakan untuk mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender.

Di Desa Ajaobaki, sudah ada peraturan desa (perdes) terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perdes tersebut antara lain memuat sanksi bagi pelaku kekerasan. "Kehadiran perdes tersebut sangat membantu, sehingga kalau untuk masalah, kami bisa kerja sama dengan kepala desa, RT, RW, dusun dengan tokoh adat dan agama," ujar Mama Gita. Di Desa Maubesi, pemerintah desa juga memberikan dukungan anggaran. "Ada kasus di dusun tetangga. Kami paralegal, kami semuanya *kan* di dusun satu. Kami mau ke sana, pakai motor butuh bensin. Uang yang kami dapat (dari pemerintah desa) untuk isi bensin, untuk memperlancar kami ke lokasi atau tempat kejadian," ujar Mama Veni.

Dukungan anggaran dari desa itu sudah dimasukkan ke dalam ADD Desa Maubesi. Oleh karena itu, walaupun program I WIL sudah selesai, kerja-kerja tim paralegal dan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender dapat terus berlanjut.

Selain dukungan dari desa, tim paralegal juga mendapat dukungan dari gereja dan pemerintah kecamatan. "Bapak Camat kasih piagam penghargaan untuk kami paralegal dan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender. Di upacara 17 Agustus, panggil kami satu per satu terima piagam penghargaan dari kecamatan," kata Vincencius Sobe.

Ansy dari Konsorsium TAS mengatakan, pihaknya berupaya membekali paralegal dengan kelengkapan yang harus mereka punya. Di level desa, harus ada Surat Keputusan (SK) paralegal atau SK satgas yang dikeluarkan oleh desa. Mereka juga perlu mendapat alokasi anggaran dari desa. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kartu identitas, seragam, dan

posko. Se jauh ini, paralegal di desa yang menjadi wilayah program I WIL sudah mendapatkannya.

Kepala Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Martinus Leonard Lely, mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada program I WIL karena sudah memotivasi pemerintah desa dan tim paralegal. Keberadaan tim paralegal di Desa Tunfeu telah diresmikan melalui SK, serta mendapat alokasi anggaran dari desa agar bisa terus bekerja maksimal. Sedangkan terkait upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Desa Tunfeu kini memiliki sejumlah perdes, antara lain tentang kekerasan terhadap perempuan; tentang hamil di luar nikah; tentang wajib belajar 9 tahun; perkawinan anak; serta tentang persalinan di rumah.

"Karena apabila terjadi persalinan di rumah, angka kematian ibu dan anak semakin meningkat. Maka kami pemerintah desa membuat perdes terkait persalinan di rumah, dan juga menganggarkan biaya untuk transportasi ke rumah sakit atau puskesmas," jelasnya.



Martinus Leonard Lely, Kepala Desa Tunfeu, (Gama/Oxfam di Indonesia)

Bersama-sama Mengambil Peran dalam Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan

Kegundahan Nur Baeni terus memuncak menuju keputusan setiap mendapati teman dalam kelompok disabilitasnya mengalami kekerasan. Dia paham dan yakin, sebenarnya korban kekerasan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar teman curhat. Namun, Nur tak paham cara melaporkannya dan menyelesaikannya.

Sebagai anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendampingan yang dia lakukan selama ini memang lebih pada psikologis karena aksesnya pada para perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan cukup luas. Namun, pendampingan semacam itu tidak cukup untuk membantu korban.

Beruntung keterlibatannya dalam HWDI akhirnya membawanya ke jalan menjadi paralegal. Konsorsium ADARA di tengah perjalanan proyek I WIL memutuskan menggandeng HWDI

NTB untuk bersama menangani kasus kekerasan berbasis gender di wilayah proyek mereka.

“Harapan saya terkabul. Menjadi paralegal adalah panggilan jiwa buat saya. Maka sangat bersyukur ketika bisa terlibat sebagai paralegal karena proyek ini,” katanya.

Sebelumnya dia hanya bisa menjadi teman bagi para korban, termasuk tetangga dekatnya. Seperti mayoritas perempuan korban kekerasan, apalagi yang menyandang disabilitas, keadilan menjadi sesuatu yang utopis bagi mereka.

Dia menambahkan, menjadi paralegal tidak hanya tentang alur dan mekanisme pelaporan formal. Nur juga belajar tentang cara berinteraksi dengan korban kekerasan dengan bermacam jenis disabilitas. Semua hal yang dia dapat dalam rangkaian pelatihan membuatnya percaya diri menjalani panggilannya sebagai paralegal.



Nur Baeni.
(Gama/
Oxfam di
Indonesia)

Dia juga sadar, begitu banyak tantangan yang menghadang di depan, sebagaimana telah dia lalui sebelumnya. Nur mengisahkan suatu saat harus mendampingi korban kekerasan yang berasal dari Lombok Tengah sementara dia dari Lombok Barat. Padahal, tidak ada kendaraan yang dapat dia gunakan. Dana operasional pun tiada. Tak menyerah, Nur lantas meminta bantuan temannya yang bersedia antar jemput ke lokasi korban.

“Yang penting ada komitmen, ada kemauan, saya yakin ada jalan. Perempuan disabilitas korban kekerasan butuh kita. Namun, yang harus diingat bahwa mereka ini kuat. Mereka tidak lemah,” tegasnya.

Geliat tokoh adat

Selain militansi perempuan yang terlibat I WIL, pengaruh para tokoh adat yang mendukung misi I WIL diakui tim Konsorsium ADARA sebagai pengubah situasi, dari semula seperti menemui jalan buntu menjadi berjalan lancar. Salah satu tokoh tersebut adalah Muhammad Yusuf. Awal kesadaran Yusuf tak lepas dari posisinya yang juga menjabat Kepala Dusun Dasan Baru, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai aparat pemerintah desa, dia sangat kesulitan memenuhi hak administrasi warganya. Data kependudukannya pun menjadi tidak valid yang berdampak pada sulitnya menyalurkan bantuan pemerintah yang memang mesti berdasarkan identitas legal formal. Salah satu



Muhammad
Yusuf, tokoh
adat Desa
Sukarara.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)

penyebab yang sering terjadi adalah tingginya angka pernikahan anak.

Jadi tidak hanya rentan dirundung kekerasan, perempuan yang menjalani pernikahan anak juga tidak bisa mengakses layanan dan bantuan pemerintah sebab mereka belum cukup umur untuk mendapatkan identitas. Situasi itulah yang membuat Yusuf langsung menyambut kedatangan tim konsorsium melalui I WIL di desanya bahkan bersedia menjadi paralegal.

Perannya sebagai Ketua Lembaga Adat Desa menjadi signifikan untuk membawa perubahan. Tentu keputusan terlibat dalam I WIL membuatnya menjumpai banyak tantangan bahkan ancaman karena masih kuatnya adat. Namun, dia akhirnya berhasil membuka jalan selarasnya hukum adat dan hukum negara dengan keputusan forum *sangkep* atau Majelis Besar Sasak yang menyatakan bahwa pernikahan anak adalah pelanggaran adat.

Pantang mundur meski minder

Militansi perempuan dalam menghapus kekerasan juga terlihat dari sepak terjang sejumlah perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya Venidora Naisaban atau Mama Veni. Mama Veni yang tidak pernah belajar ilmu hukum secara formal, kini telah menjadi salah satu sosok penting bagi upaya pendampingan korban



Venidora
Naisaban.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)

kekerasan di desanya. Meski awalnya merasa minder, ia pantang mundur untuk terus belajar sekaligus mempraktikkan ilmunya sebagai paralegal.

Warga Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara itu telah mendampingi banyak perempuan di desanya yang menjadi korban kekerasan. "Pendidikan saya hanya SMP. Tapi saya tidak merasa putus asa, minder, saya tetap maju untuk bekerja dalam tugas saya sebagai paralegal untuk membantu masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Khususnya perempuan dan anak-anak di desa kami," kata nenek satu cucu itu.

Ia bercerita, ketika pertama kali mendapat pelatihan untuk menjadi paralegal dalam program I WIL pada 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan di desanya terbilang tinggi. Dengan hadirnya paralegal

seperti dirinya dan sejumlah warga lain, jumlah kasus mulai berkurang.

Di desanya, Mama Veni adalah satu dari delapan paralegal. Mereka bertugas mendampingi masyarakat yang menjadi korban kekerasan, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ingkar janji menikah (IJM), hingga kekerasan seksual.

Selain mendampingi korban kekerasan berbasis gender, Mama Veni juga melakukan sosialisasi tentang keberadaan paralegal kepada warga di tingkat RT, dusun, juga sekolah-sekolah. Saat sosialisasi, ia meminta agar perempuan tidak takut untuk melapor jika dirinya menjadi ataupun melihat ada kasus kekerasan.

Penekanan agar perempuan jangan merasa takut menjadi penting karena sejauh ini, kebanyakan pelaku kekerasan berbasis gender adalah orang terdekat korban, entah suami, keluarga, maupun tetangga korban.

“Kami tekankan pada perempuan, jangan takut, ketika ada kasus jangan diam. Harus ungkapkan. Kalau kita diam berarti laki-laki itu akan tetap melakukan kekerasan setiap saat. Tapi kalau kita ungkapkan pasti mereka juga akan sadar untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya.

Digerakkan rasa tanggung jawab

Semangat untuk menghapus kekerasan terhadap anak dan

perempuan juga muncul dalam dari Ishak Boenbalan. Sebagai laki-laki, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak tertangani di desanya membuatnya merasa tergugah. Ia merasa turut bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, begitu ada pelatihan untuk menjadi paralegal, ia pun bergabung. “Kalau dari pihak-pihak terkait tidak menanganinya, tidak bergabung di paralegal untuk melihat kasus-kasus seperti ini, kasusnya akan menumpuk. Tidak akan pernah selesai,” kata warga Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT tersebut.

Ishak bergabung sebagai paralegal pada 2018. Kasus pertama yang ia tangani adalah korban hamil di luar nikah yang ditinggal oleh pelaku. Ishak memberanikan diri mendampingi korban meskipun dirinya sama sekali belum memiliki pengalaman. Setelah mendengar cerita dari penyintas, ia pun memutuskan untuk melaporkan kasus itu ke polsek setempat. Berdasarkan laporan Ishak, pelaku pun dipanggil oleh pihak kepolisian. Di sana, pelaku menyatakan mau bertanggung jawab sehingga pelaku dilepaskan. Namun, tak berapa lama kemudian pelaku kembali mengingkari janjinya lagi dan tidak mau menikahi penyintas. Ishak pun kembali melaporkan kasusnya. “Kebetulan waktu itu saya di kecamatan. Pak Camat bilang, oke nanti saya dampingi,” tuturnya.

Ishak
Boenbalan.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)



Kasus tersebut akhirnya diambil alih oleh pihak kecamatan. Mereka berupaya menghadirkan pihak penyintas dan pelaku dengan mengeluarkan surat panggilan. Namun, pelaku tidak mau datang dan bahkan berencana menikah dengan orang lain. Melihat situasi tersebut, Ishak mengirim surat kepada pemerintah desa, kecamatan, gereja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kupang. Ia bersama Camat Nekamese juga hadir ke pemberkatan pernikahan pelaku di gereja. Akibatnya, ia dianggap mengganggu pemberkatan dan bahkan dilaporkan ke Polres Kupang oleh keluarga pelaku. Setelah Ishak menjelaskan apa yang terjadi, polres justru mendukungnya. Dukungan juga datang dari Dinas Dukcapil dengan tidak mengeluarkan

catatan perkawinan. “Setelah itu, kami proses dengan Pak Camat. Kami sampaikan ke keluarga bahwa kami siap lapor ke polisi. Akhirnya keluarga dan pelaku hadir, dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di kantor camat,” tambahnya.

Setelah kasus pertama itu, sebagai paralegal Ishak menangani berbagai kasus lainnya, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga ingkar janji menikah. Menurut dia, sebelum ada tim paralegal, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di desanya sangat tinggi. Kehadiran tim paralegal membawa dampak positif tak hanya bagi Desa Tunfeu namun juga desa-desa sekitarnya. Ini karena Ishak dan anggota tim paralegal lainnya rajin melakukan sosialisasi melalui pertemuan hingga hajatan. “Kami hadir dan sampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang sudah diperhatikan. Hati-hati kalau kita hal-hal yang memicu terjadinya kekerasan,” katanya.

Ishak mengungkapkan, keberaniannya untuk mendampingi kasus tidak lepas dari pelatihan-pelatihan yang dia ikuti di program I WIL. Sebagai sarjana ekonomi, semula ia tidak tahu apapun tentang hukum. Namun, sebagai paralegal, kini ia lebih memahami hukum dan bisa menggunakannya untuk menangani kasus kekerasan. “Walaupun tidak 100 persen kami tangani kasus sampai tuntas dengan

baik. Tapi kami merasa ada perubahan dalam diri kami ketika mendampingi suatu kasus. Itu yang kami rasakan,” ucapnya.

Pekerjaan domestik bukan hanya tugas istri

Kisah lainnya datang dari Lewi Yulianus Ablelo atau Om Lewi. Sebagaimana umumnya para lelaki di desanya, ia tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Baginya, pekerjaan semacam itu adalah pekerjaan istri. Oleh karena itu, setiap pulang dari bercocok tanam di kebun, ia merasa tak perlu melakukan pekerjaan rumah. “Jadi saya pulang dari mana saya taunya makan, (lalu) keluar lagi,” ucapnya.

Kondisi semacam itu perlahan berubah setelah warga Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT ini mengikuti pelatihan tentang Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender yang diadakan Konsorsium TAS sebagai bagian dari program I WIL pada Maret 2021. Ia mengikuti pelatihan karena ditunjuk oleh Pemerintah desa Oelomin sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat. Pelatihan ini membuka wawasannya tentang laki-laki dan perempuan.

Dalam pelatihan dua hari itu, ia mendapat banyak pelajaran baru terkait rumah tangga. Antara lain bahwa dalam hal pekerjaan rumah

tangga, misalnya, laki-laki dengan perempuan itu sama. Pekerjaan rumah tangga bisa dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal itu membuatnya merefleksikan kembali sikapnya terhadap istri, anak, serta lingkungan sekitar tempat tinggalnya selama ini.

“Sejak hari pertama pelatihan banyak hal-hal baru yang saya pelajari, antara lain tentang cara pandang laki-laki dan tentang kesetaraan gender. Materi pelatihan membuat saya tidak dapat tidur, karena apa yang disampaikan oleh nara sumber sangat berbeda, bahkan bertolak belakang, dengan apa yang selama ini saya pahami dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Pelan-pelan, Om Lewi pun memutuskan untuk mengubah sikap, khususnya kepada istri, anak dan lingkungan. Melakukan pekerjaan rumah tangga pun mulai menjadi hal yang biasa ia lakukan. Sehari-hari, ia berbagi tugas dengan istrinya.



Lewi Ablelo.
[Gama/Oxfam
di Indonesia]

Ketika istri belum masak, maka Om Lewi akan memasak. Demikian pula ketika istrinya belum sempat mengepel lantai. Om Lewi akan melakukannya. Hal itu berlaku untuk pekerjaan rumah tangga lainnya. Selain itu, sebagai Ketua RT, ketika ada masyarakat yang melakukan kekerasan ia tidak segan untuk memberikan nasihat hingga teguran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan atau siapa saja.

Om Lewi menyadari bahwa apa yang ia lakukan dengan pekerjaan rumah masih terasa aneh bagi sebagian warga di desanya. Namun, ada sejumlah warga yang mengerti apa yang ia lakukan dan memberikan dukungan penuh. Untuk itu, ia berharap bisa membawa bapak-bapak lain di desanya untuk mempelajari hal yang sama, sehingga akan semakin banyak laki-laki yang memiliki perspektif baru dalam melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Jalan keluar dari lembah kelim

Pemahaman baru akan kesetaraan gender tidak hanya mengubah sikap Mustiadi terhadap istri dan anak di rumah, namun juga mengubah jalan hidupnya.

Siapa pun bisa berada di titik terdalam dan tergelap jurang kehidupannya. Yang membuat berbeda adalah apakah seseorang mampu sadar, bangkit, dan berjuang untuk keluar. Itulah yang dialami

Mustiadi, warga Dusun Gontoran, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Menjadi penadah motor curian hingga kebiasaan mabuk membuatnya dicap sampah masyarakat oleh warga sekitarnya.

Mustiadi sadar yang dia lakukan saat itu jelas melanggar semua norma dan hukum yang ada. Namun, dia beralasan desakan ekonomi dan sosial yang membuatnya terjerumus. Keputusannya menjadi TKI di negeri orang tetap tidak menyelesaikan masalahnya secara signifikan.

“Saya memang bisa membangun rumah dan membayar hutang, tetapi jangankan untuk modal usaha setelah pulang, untuk hidup sehari-hari masih saja sulit,” katanya.

Dalam situasi seperti itulah ia bertemu dengan Nurhayati, warga di dusunnya yang telah menjalankan UMKM. Nurhayati mengajaknya bergabung dengan kegiatan Konsorsium ADARA, yang dimulai dengan pelatihan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender.

“Awalnya saya menganggap ini hanya akal-akalan menjalankan program dengan menjual kami, ujungnya merekalah yang dapat gaji lebih banyak,” ujarnya.

Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat mengikuti pelatihan. Ucapan salah seorang fasilitator pelatihan begitu diingatnya, yaitu tentang belajar hal yang membuat seseorang merasa sangat terpaksa melakukannya justru akan membawa



Mustiadi. (Foto oleh Baskara Qazwaini Karim)

perubahan ke arah yang lebih baik. Mustiadi yang memang sangat ingin mengubah citra sekaligus mengangkat harga diri keluarganya di mata masyarakat kampung langsung mempraktikkan apa yang dilatihkan.

Ia mendekati diri dengan keluarganya dengan mulai berbagi peran dengan istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mustiadi semakin sadar bahwa kebahagiaan keluarganya tidak semata dari jumlah uang yang ia berikan. Kesadaran akan kesetaraan peran itu membawanya bergabung sebagai paralegal di desanya.

Pandangan warga sekitar terhadapnya mulai berubah. Aktivitasnya sebagai paralegal maupun Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender membuatnya dinilai telah meninggalkan perilaku buruk di masa lalu.

“Banyak hal positif yang saya rasakan dan dapat dari konsorsium, terutama tentang bersikap baik kepada perempuan. Konsorsiumlah yang bisa mengubah saya menjadi orang yang lebih baik,” tegasnya.

Pilar Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dalam Lensa

Vinsensius Fomeni, Kepala Desa Maubesi (NTT), berbagi pekerjaan domestik dengan istri, salah satunya menjemur pakaian. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Muhali, Sekdes Pemepek, tak sungkan mengerjakan pekerjaan domestik sebagai bagian dari Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Lokakarya Penyusunan SOP Rujukan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di NTT. (Foto oleh Alfes S. Lopo)



Foto Bersama Cross Learning Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender-NTT. (Gama/Oxfam di Indonesia)

The image features a large green background with several overlapping, irregularly shaped blocks of color. At the top left, there is a blue block. To its right, a purple block extends downwards. In the center, a yellow block with rounded corners contains the text 'PILAR II'. At the bottom, there are several overlapping blocks in orange, light green, and purple, creating a layered effect.

PILAR II

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan (*Women economic empowerment*) merupakan pilar kedua program I WIL. Pilar ini ingin mewujudkan perempuan yang berdaya melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan bisnis inklusif. Ketergantungan ekonomi selama ini merupakan salah satu faktor yang membuat posisi tawar perempuan lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Pilar ini juga menasar pada pengurangan beban kerja perempuan dan mendorong pembagian kerja domestik yang lebih adil di dalam rumah tangga. Harapannya, dengan berkurangnya beban kerja perempuan di rumah, perempuan dapat memiliki ruang lebih untuk berpartisipasi dan berkembang dalam

kegiatan ekonomi melalui kelompok usaha maupun politik, misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*). Oleh karena itu, menguatnya posisi tawar perempuan yang terlibat dalam program I WIL menjadi capaian di pilar *Women economic empowerment*. Tulisan berikut menyajikan upaya yang dilakukan dalam mendorong perempuan menjadi berdaya secara ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pembentukan kelompok usaha perempuan, pelatihan tentang peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran, hingga legalitas usaha menjadi bagian dari upaya tersebut.

Perempuan Berdaya Membangkitkan Ekonomi Bersama

Bila kelak berkesempatan menyaksikan langsung gelaran World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok, Anda akan menjumpai stan Lumbung Sensek yang menjual syal tenun unik berwarna alam di area luar lomba. Siapa sangka produk yang kini merambah pasar dunia itu dihasilkan sekelompok perempuan yang bahkan sekitar tiga tahun lalu masih tertunduk kalah di hadapan para pengepul kain dan rentenir.

Selama ini jika ada yang menanyakan tenun khas Lombok Tengah, maka otomatis akan ditunjukkan Desa Sukarara di Kecamatan Jonggat. Bahkan kalau melakukan pencarian kata “tenun Lombok” di mesin pencari di internet, Desa Sukarara akan selalu muncul sebagai salah satu hasilnya.

“Tetapi faktanya banyak penenun di Sukarara yang masih menjadi buruh tenun. Padahal penenunlah yang memiliki alat produksi dan pengetahuannya adalah penenun,” kata Haiziah Gazali, Ketua Gema Alam NTB yang juga Women Economic Empowerment Specialist Konsorsium ADARA.

Posisi sebagai buruh tenun membuat perempuan penenun rentan. Mereka tidak memiliki akses bahan baku yang adil apalagi punya kuasa menentukan harga. Hingga menurut Koordinator Konsorsium ADARA, Muhammad Juaini, mereka akhirnya terjerat belitan hutang di rentenir.

Khairunnisa, penenun asal Desa Sukarara mengisahkan sebelum terlibat dalam kegiatan I WIL, mayoritas penenun menjual hasil kainnya ke *art shop* dan pengepul. Dari para pengepul pulalah mereka mendapatkan benang sebagai bahan baku, sehingga saat hasil kain



Muhammad Juaini,
Koordinator
Konsorsium
ADARA.
(Gama/
Oxfam
di Indonesia)



Khairunnisa,
Ketua
Lumbung
Sensek
Desa
Sukarara.
[Gama/Oxfam
di Indonesia]

dibeli pengepul harganya akan dipotong harga benang. Harga kain tenun mereka akan makin murah jika dipotong lagi dengan pembayaran pinjaman penunun pada pengepul. Kain seharga Rp350 ribu bisa hanya dibeli Rp75 ribu.

“Hubungan jual beli maupun pinjaman ke pengepul sifatnya perorangan. Dan itu dilakukan semua ibu-ibu di sini,” kata Nisa, begitu dia biasa dipanggil.

Pinjaman tersebut biasanya untuk pemhingga pengemasan kain tenun yang dihasilkan tidak pernah berubah turun temurun.

Situasi statis ini membuat mereka tak mampu keluar dari jeratan ekonomi yang serbakurang. Rentan secara ekonomi berdampak pula rentan terhadap tindakan sewenang-wenang termasuk kekerasan terutama dari pasangan. Poin inilah yang menjadi dasar pilar *women economic empowerment*.

“Pilar *women economic empowerment* merupakan strategi pencegahan yang coba kami lakukan. Kurangnya kemampuan ekonomi dan kapasitas perempuan turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan yang mereka alami,” kata Juaini.

Percaya diri berbuah inovasi

Ketidakberdayaan perempuan penunun sebenarnya ironis. Sebab selain popularitas, mereka juga sudah memiliki alat produksi hingga lahan. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan, dan tentu sebelum itu adalah kesadaran bahwa mereka berhak mendapat pengetahuan dan keberdayaan dalam prinsip kesetaraan.

Itulah bagian dari kegiatan pilar *women economic empowerment*. Tidak hanya melatih keterampilan usaha melainkan juga penguatan kapasitas dasar terkait kesetaraan.

“Awalnya dulu untuk bertemu orang banyak saja malu, tidak ada perempuan yang berani mengeluarkan pendapat. Setelah ikut beberapa pelatihan, mulai berubah,” kata Nisa.

Keberanian itu perlahan meningkatkan rasa percaya diri yang berujung pada kreativitas. Mulai dari bahan pewarna alam maupun jenis dan motif kain tenun mereka utak-atik, agar keluar dari kebiasaan yang monoton dan menjenuhkan pasar. Para perempuan penunun pun membentuk kelompok, bernama Lumbung Sensek. Nisa dipercaya sebagai ketuanya. Lumbung

Sensek sudah beranggotakan 28 orang dari 6 dusun.

Dengan berkelompok, mereka tidak lagi bekerja individual dan membagi peran baik saat mengikuti pelatihan maupun bekerja. Mereka terbagi dalam divisi produk, desain, dan pemasaran. Mereka akhirnya berhasil menciptakan produk khas andalan yaitu syal pewarna alam, khususnya dengan motif cokelat dari kulit biji asam yang banyak tumbuh di Sukarara. Produk itulah yang tersaji di area ajang WSBK sejak tahun lalu, dan telah mendapat banyak pesanan dari luar Lombok.

“Kami sebenarnya hanya pengungkit, membuat mereka sadar bahwa mereka punya potensi baik di dalam diri maupun limpahan sumber daya di sekitarnya. Setelah mereka sadar dan percaya diri, mereka mulai bisa mengontrol semua tahapan rantai nilai dari penyediaan bahan baku hingga pasar,” kata Haiziah.

Semakin matang dan berkembangnya kelompok ini hingga akhirnya, dengan dukungan Pemerintah Desa Sukarara, dirintislah konsep Lumbung Sensek yang lebih terbuka.

Menurut Zainal Rahman, Sekdes Sukarara, yang dilakukan Lumbung Sensek merupakan pemberdayaan ekonomi perempuan penenun sesungguhnya. Maka pemerintah desa pun mendukung penuh untuk mengusung konsep Wisata Tenun Lumbung Sensek.



Zainal Rahman,
Sekdes
Sukarara.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)

Berkah manis gula semut

Kisah serupa ada di Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Sejak lama, sebagian besar perempuan di desa itu memiliki dua produk untuk dijual, yaitu keripik pisang dan air nira pohon aren. Keripik pisang jalan di tempat karena hanya dipasarkan di desanya sendiri. Sedangkan nira aren lebih banyak merugi sebab hanya bisa bertahan satu hari. Lewat itu akan rusak dan mesti dibuang.

“Banyak pengetahuan yang kami dapatkan dari pelatihan. Ketika kami menyadari besarnya potensi nira aren namun butuh keterampilan pengolahan jadi bentuk lain, proyek ini menyediakan

pelatihan bahkan membantu membuka akses pasarnya,” kata Ustini, Ketua Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif (KPKK) Desa Jurit Baru.

Oleh Ustini dan perempuan lain yang terlibat I WIL, nira aren diolah menjadi gula semut yaitu gula berbentuk serbuk seperti gula pasir. Gula semut berkualitas bagus bisa bertahan 3,5 tahun. Inovasi ini membuat nira aren tidak lagi terbuang percuma. Pasar juga lebih antusias menyerap gula semut.

Gula semut bahkan sudah diterima di ritel-ritel modern seperti Alfamidi dan MGM karena dinyatakan memenuhi standar kualitas dan memiliki legalitas. Bahkan akhirnya gula semut produksi Ustini dan kelompoknya terpajang di stan di perhelatan ASEAN People Forum di Kamboja 2022.

Sejalan dengan Lumbung Sensek, mereka pun lantas membentuk kelompok bernama KPKK, yang sekarang beranggotakan 26 orang. Selain struktur, SOP, dan pembagian peran yang jelas, para anggota KPKK pun telah memiliki lahan khusus pohon aren. Mereka memiliki visi mengembangkan Jurit Baru sebagai kampung aren tempat akan dilakukan pembibitan hingga pengolahan seluruh bagian aren termasuk nira, daun, dan akar.

“Kami sudah tidak khawatir lagi dengan pasar, berapa pun produksi kami akan ditampung oleh ritel yang telah bekerja sama. Dukungan pemerintah luar biasa, baik alat produk maupun beragam kemudahan termasuk perizinan. Semua ini tak mungkin terwujud tanpa teman-teman konsorsium melalui I WIL,” kata Ustini.



Ustini, Ketua
KPKK Desa
Jurit Baru.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)

Gula dadu

Di Desa Pemepek, Baiq Nilawati menemukan ide cemerlang usai mengikuti pelatihan di Desa Jurit Baru yang diadakan Konsorsium ADARA. Alih-alih meniru membuat gula semut seperti yang dilatihkan, dia memilih memproduksi gula dadu.

“Itu gula yang berbentuk dadu kecil-kecil, yang praktis dikonsumsi karena takarannya pas untuk satu porsi minuman seperti kopi misalnya,” katanya.

Produk gula dadu itu lantas laku keras. Tidak hanya soal kepraktisan, dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi daya tahan gula dadu sangat lama apalagi jika disimpan di *freezer* lemari es.

Sebelum memproduksi gula dadu, seperti kebanyakan perempuan perajin gula aren di desanya, Nilawati membuat gula batok. Gula batok ini berukuran besar dengan berat 1-1,5 kg. Menurutnya gula batok kurang diminati sebab sangat merepotkan saat hendak diolah. Tidak sedikit yang terluka tangannya saat mengiris gula batok.

Gula dadu buatan Nilawati kini tidak hanya dipasarkan di desanya. Produknya sudah merambah desa lain di Lombok Tengah seperti Pagutan, Nyerot, Batutulis, bahkan sudah sampai Lombok Barat.

“Selain aren, ada juga desa yang saat musim kemarau mengalami kelebihan produksi kedelai. Akibatnya harga jatuh dan banyak yang rusak karena tidak terserap. Kemudian kami ajak teman-teman perempuan di situ untuk membuat makanan olahannya seperti stik kedelai,” kata Juaini.

Dia menambahkan, ada juga desa yang berlimpah cabai di saat panen raya dan mengalami situasi serupa kedelai. Akhirnya diolah menjadi sambal kering dengan berbagai varian rasa antara lain berlabel Sambal D’cobek. Jadi menurutnya, meskipun dinamika tiap desa berbeda namun akhirnya bisa memiliki produk khas dengan standar yang bahkan lolos kurasi Dinas Perdagangan NTB.

“Setelah kualitas sudah stabil sesuai standar, kami berupaya membantu perluasan akses pasar antara lain lewat Tokopedia. Kelak setelah ada peningkatan kapasitas terkait

pengelolaan di Tokopedia, kami berharap admin tokonya langsung dipegang kelompok yang memiliki produk. Kalau saat ini mereka sudah menggunakan WhatsApp Business,” ujar Haiziah.

Penggunaan WhatsApp Business maupun teknologi informasi terkini lainnya memang telah dilatihkan pada mereka. Baik kelompok perempuan di NTB maupun NTT telah mendapatkan pelatihan pemasaran digital, antara lain tentang mendesain kit pemasaran menggunakan aplikasi Canva bahkan hingga penggunaan strategi ATEAR untuk pemasaran daring mereka.

Para perempuan itu berani keluar dari kebekuan yang lama mengungkung dan menerima hal-hal baru dengan pikiran terbuka, sehingga kini mulai dapat mengkreasi masa depan baru yang lebih menjanjikan.



Baiq Nilawati, produsen gula merah praktis. (Gama/Oxfam di Indonesia)

Mengatasi Kendala Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan

Menenun bagi mama-mama di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kini bukan lagi sekadar kegiatan musiman. Ini jelas berbeda dengan kondisi tiga tahun lalu, ketika menenun hanya dilakukan setelah ada orang yang memesan. Penenun Desa Oesena tidak lagi harus menunggu pesanan karena pasar bagi hasil tenun mereka sudah semakin luas.

Sulitnya menjual produk memang menjadi kendala yang dihadapi perempuan pelaku usaha di Desa Oesena dan sejumlah desa lainnya di Nusa Tenggara Timur. Selain pemasaran, inisiatif mereka dalam menunjang ekonomi keluarga terkendala banyak hal sehingga usaha mereka tidak berkembang.

Widia Ullu selaku Women Economic Empowerment Specialist Konsorsium TAS dalam program I WIL yang didukung Oxfam di Indonesia mengatakan, sebelum adanya program I WIL, pengembangan usaha kelompok-kelompok perempuan sangat sulit. Ia melihat ada tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya, yakni kendala

dalam hal pemasaran, kualitas produk, dan legalitas.

Upaya penguatan kelompok usaha perempuan pun dilakukan dengan berfokus pada tiga kendala tersebut. Peningkatan kapasitas bagi para perempuan yang menjadi anggota kelompok usaha dilakukan melalui rangkaian pelatihan dengan materi yang sesuai kebutuhan mereka.

Berbasis potensi lokal

Menurut Widia, penguatan kapasitas harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Dengan begitu, materi pelatihan pun mengikuti. Untuk daerah yang kuat di tenun, misalnya, ia melihat bahwa pasar tenun sudah jenuh. Anjuran untuk menggunakan tenun sebagai bahan seragam pegawai memang telah membantu para penenun. Namun, penyerapannya dirasa masih kurang. Untuk itu, perlu ada terobosan baru. Maka, muncullah ide untuk membuat produk turunan dari tas, maupun modifikasi pakaian dengan menggunakan tenun. Terobosan itu cukup berhasil.

Widia Ullu,
Women Economic
Empowerment
Specialist
Konsorsium TAS.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)



Adapun untuk daerah yang kuat di produk pertanian, misalnya penghasil ubi, ketela dan pisang, mereka didorong untuk mengolahnya menjadi camilan. Selain meningkatkan kualitas camilan yang selama ini telah dibuat, aspek pemasaran juga dilihat. Dulu, para pembuat camilan biasanya mengemas camilannya dalam wadah kecil untuk dititipkan ke warung tetangga dengan harga Rp1.000 per bungkus. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diajak untuk memproduksi camilan yang bisa dinilai tinggi. Untuk itu, kualitas produk dan kemasannya ditingkatkan.

Mereka juga mendapat penyuluhan tentang keamanan pangan yang dilakukan dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Proses itu membantu mama-mama yang memiliki produk olahan makanan untuk mengurus legalitas produk agar lebih diterima pasar.

Berkelompok agar kuat

Keberadaan kelompok usaha menjadi salah satu aspek penting dalam pendampingan yang dilakukan agar para pelaku usaha perempuan itu terwadahi dalam satu forum sehingga bisa saling belajar dan maju bersama. Untuk itu, para perempuan pelaku usaha didorong untuk aktif dalam kegiatan kelompok usaha.

Ketua Kelompok Perempuan Ainan Fen Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang Marcelina Boymau mengatakan, jauh sebelum kelompok tenun terbentuk, menenun sudah menjadi bagian dari keseharian warga khususnya perempuan. Hampir seluruh warga Desa Oesena adalah penenun. Namun, mereka menenun pada musim tertentu saja, yakni jika tidak ada musim kerja di sawah dan kebun. Menenun dilakukan di waktu luang setelah panen karena dianggap bukan aktivitas ekonomi yang menjanjikan.



Kelompok
Perempuan Ainan
Fen Desa Oesena.
(Foto oleh Yohannes
Dody Kolo)

Setelah kelompok tenun terbentuk, ada banyak perubahan yang terjadi. Anggota kelompok kini memahami strategi pemasaran sehingga bisa menjangkau pembeli di Kupang maupun luar daerah yang dijangkau dengan media sosial, menghitung harga pokok produksi, hingga pembuatan label produksi.

Semua itu membuat mereka lebih punya kepastian tentang pasar bagi produk tenun mereka. Dengan begitu, kini mereka sudah mulai rutin menenun sehingga bisa menambah pemasukan bagi ekonomi keluarga. “Jadi bisa menyekolahkan anak dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi,” katanya.

Cerita yang sama dialami Oliva Lopo, penenun di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Ia mulai bergabung dengan kelompok tenun di desanya pada 2021. Ibu dua anak itu semula mengaku enggan bergabung dengan kelompok karena menilai hanya membuang waktu. Apalagi, menjadi anggota kelompok berarti harus membayar iuran rutin. “Tapi setelah

dua tiga kali diajak, saya berminat bergabung,” katanya.

Setelah cukup aktif bergabung dalam Kelompok Perempuan Kasih, Oliva mulai merasakan manfaatnya. Ia dipercaya untuk mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan pengembangan usaha. Bahkan, ia tak hanya mengikuti satu pelatihan saja. Ia antara lain mengikuti pelatihan tentang pemasaran digital dan penyusunan material pemasaran (*marketing kit*) dan *business meeting*. Pelatihan-pelatihan tersebut diikuti oleh anggota kelompok usaha perempuan dari 12 desa program I WIL di NTT.

Di pelatihan tentang pemasaran, Oliva mendapat pelajaran terkait cara mempromosikan produk dan membuat materi promosi digital. Adapun untuk saluran promosinya, ia diajari untuk menggunakan sejumlah platform media sosial. “Sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang itu semua. Saat pelatihan itu saya belajar banyak. Promosi produk saya melalui sosial media dan melalui aplikasi Canva. Waktu itu ada juga yang langsung memesan produk yang saya

Oliva Lopo mengoptimalkan telepon selulernya untuk melakukan pemasaran produk tenunnya secara online. (Gama/Oxfam di Indonesia)



pasarkan dan langsung diantar dan tidak tanya jawab lagi tentang harga dan ukuran, karena sudah tertera semua jelas di situ,” terangnya.

Lalu di pelatihan tentang *business meeting*, ia belajar tentang calon pembeli yang menjadi target ke depan. “Jadi kita sudah bisa menargetkan produk kita. Orangya seperti apa. Dan kita bisa membuat produk yang kita buat itu sesuai dengan target yang kita rencanakan. Itu sudah sebagai khayalan untuk kita bahwa kita sudah mengetahui orang yang akan membeli seperti apa dan tenunan yang kita buat itu disesuaikan dengan selera dari target itu,” jelasnya.

Semua itu membuat Oliva merasakan perubahan nyata. Kini ia bersama anggota kelompok tenun lainnya memiliki pasar yang lebih jelas sehingga selalu ada yang memesan produk

tenunnya. “Saya tidak tunggu orang pesan. Tetapi tenun terus menerus karena sudah ada pasar yang siap menerima produk kami,” tambahnya.

Berjejaring dengan berbagai pihak

Kelompok usaha perempuan juga dibentuk di sejumlah desa lainnya yang menjadi wilayah program I WIL di NTT, baik kelompok usaha tenun, olahan makanan, maupun ternak. Selain mendapat pelatihan terkait peningkatan kualitas produk, legalitas usaha dan pemasaran, mereka juga dihubungkan dengan berbagai pihak yang bisa membantu.

Novilia Simamora yang merupakan salah satu anggota Forum Perempuan Sehati, Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, merasakan perubahan nyata setelah mengikuti berbagai pelatihan. Produk camilannya yang biasanya hanya dibungkus plastik ukuran kecil untuk dititipkan ke warung tetangga sudah berganti dengan kemasan yang lebih tebal. Pemasarannya pun tidak lagi hanya mengandalkan tetangga, tetapi juga menyasar kantor-kantor instansi pemerintah, maupun di tempat-tempat yang ramai, serta di galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT. “Ada perubahan penghasilan. Bisa mendukung biaya hidup dalam rumah,” ujarnya.

Stefanus N. Parera dari Dekranasda NTT mengatakan, pihaknya mendukung penuh program pendampingan kelompok usaha perempuan yang dilakukan

Konsorsium TAS. Pihaknya menyediakan pelatihan pemasaran produk, baik secara luring maupun daring. Selain itu, pihaknya juga bisa memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk keamanan pangan. Produk-produk dari kelompok usaha yang sudah mendapat pelatihan pun akan dibantu pemasarannya.

“Teman-teman dari UMKM tidak perlu khawatir untuk menjual produknya ke Dekranasda. Karena biasanya kita membeli secara langsung. *Cash and carry*. Jadi ketika mereka membawa barangnya ke kita, kita langsung membeli. Tujuannya supaya mereka bisa langsung memproduksi lagi. Sehingga ketika melakukan pemesanan, stoknya selalu ada,” terangnya.

Dalam hal perizinan, Nancy Theresia Tibuludji selaku konsultan pendamping di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLLUT) Dinas Koperasi dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT mengatakan, pihaknya sejauh ini telah memfasilitasi perizinan



Galeri Dekranasda NTT. (Gama/Oxfam di Indonesia)

bagi sejumlah usaha perempuan bekerja sama dengan Konsorsium TAS. Ia menekankan bahwa legalitas usaha menjadi perlu karena akan berentetan dengan hal lain, misalnya izin edar produksi industri rumah tangga.



Produk stik seledri Forum Perempuan Sehat Desa Debelo. (Gama/Oxfam di Indonesia)

Para Perempuan Penghasil Emas

Tak jarang sesuatu yang dipandang sepele dan bahkan dianggap sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Semuanya tergantung motivasi dan kreativitas. Di tangan para perempuan tangguh ini, produk-produk yang semula tak bernilai berubah menjadi laksana emas.

Di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, misalnya, para perempuan menyulap sisa tenun menjadi produk bernilai jual tinggi.

Rerempek, begitu nama kain tenun yang digalakkan kembali oleh Kelompok Nine Penenun, nama wadah perempuan penenun di desa itu. Rerempek yang ditunen dari benang sisa sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun, tidak banyak yang berminat membuatnya sehingga makin jarang ada.

“Harga jualnya sangat murah. Akhirnya banyak penenun terutama ibu yang sudah lansia memilih membuang sisa benang yang ada,” kata Siti Hidayati, Bendahara Kelompok Nine Penenun.

Harga jual yang murah itu menurut Ida, begitu dia biasa dipanggil, akibat terbatasnya pasar yang bisa menyerap produk rerempek. Keterlibatan dalam proyek I WIL membuat Ida dan teman-teman penenunnya dibantu Konsorsium ADARA untuk memperluas akses pasar. Maka tugas berikutnya dari adalah berpikir kreatif tentang rerempek.

“Saat itu belum membentuk kelompok secara resmi. Kami akhirnya mulai membuat rerempek dalam



Siti Hidayati.
(Gema/Oxfam
di Indonesia)



Kerupuk kedelai
produksi Kelompok
Patuh Angen Desa
Nyerot. [Gama/Oxfam
di Indonesia]



Rerempek
produksi
Kelompok
Nina Penunen.
[Gama/Oxfam
di Indonesia]

bentuk syal, yang secara khusus menggunakan pewarna alam. Hasilnya sangat bagus dan potensi harganya jauh lebih tinggi,” katanya.

Namun, semangat mereka diuji karena tidak mudah meyakinkan para penenun lansia. Padahal, mereka dibutuhkan agar pasokan produk bisa terjamin. Baru setelah terbukti harga jualnya tinggi, semangat mereka naik drastis.

Setelah itulah lahir Nine Penunen, yang awalnya lebih sebagai wadah untuk mengumpulkan dan memasarkan produk para perempuan penenun Pringgasela Selatan. Keberadaan kelompok menjadi penting sebab banyak perempuan penenun di desa itu yang terjerat hutang di tengkulak yang sekaligus rentenir. Mereka terpaksa menjual kain tenun atau melunasi hutang.

“Harga kain yang wajar berkisar Rp200 ribu, bisa terpaksa dijual Rp100 ribu pada tengkulak. Biasanya saat terdesak kebutuhan sehari-hari atau sekolah anak,” ujarnya.

Upaya tersebut tidak sia-sia. Setelah pembagian peran di kelompok sudah berjalan baik, arus produksi dan penjualan mulai naik. Syal dari rerempek menjadi ikon baru Pringgasela Selatan. Produk itu beserta Nine Penunen pun dikenal hingga luar daerah.

Sokongan pemerintah desa mengalir, diawali dengan penyediaan lokasi untuk balai tenun hingga yang terbaru adalah inisiasi sekolah tenun pada 2023. Sekolah tenun ini selain bagian dari wisata tenun, juga menumbuhkan minat dan keterampilan menenun termasuk pada anak, agar kelak tradisi tenun tidak hilang dari Pringgasela Selatan.

Kerupuk kedelai Pol

Bila kreativitas Nine Penunen telah memiliki fondasi tradisi tenun di Desa Pringgasela Selatan, bisnis kreatif yang tumbuh di Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah lahir dari penggalan potensi dan uji



Suharyati. (Gama/
Oxfam di Indonesia)

coba. Adalah Suharyati, yang mulai mencoba membuat produk turunan dari kedelai.

Kedelai banyak ditanam di Nyerot, tapi umumnya dijual saat masih muda atau dalam bentuk biji kering. Setelah mendapat pelatihan dari Konsorsium ADARA melalui I WIL, tebersit dalam benaknya untuk memanfaatkan kedelai.

“Setelah sekian percobaan akhirnya ketemu produk dengan racikan yang pas yaitu kerupuk kedelai. Rasa dan kualitasnya diterima banyak pihak. Saya beri nama merek Pol. Setelah itu saya dipercaya kelompok untuk mempromosikan langsung produk ini ke pihak luar,” katanya.

Kelompok yang dimaksud adalah Patuh Angen, kelompok perempuan di Nyerot yang fokusnya di pemberdayaan ekonomi. Kelompok ini kini beranggotakan 14 orang dengan Suharyati duduk sebagai bendaharanya.

Suharyati menegaskan tanpa pelatihan yang mereka terima,

perubahan tak mungkin terjadi di desanya. Para perempuan, terutama yang tergabung dalam Patuh Angen, bisa mengembangkan diri berkat pengetahuan dan keterampilan baru dari pelatihan.

“Yang lebih penting, kami bisa membantu teman desa lain di luar kelompok sehingga kami semua bisa maju bersama termasuk dalam hal ekonomi,” ujar Suharyati yang juga seorang pengajar di PAUD.

Berkat kerupuk kedelai kreasinya, Suharyati berkesempatan mengikuti beragam pameran hingga tingkat provinsi. Produknya pun sering dibawa sebagai buah tangan dari Nyerot, bahkan hingga ke Perancis.

Kini cita-cita Suharyati bisa maju selangkah lagi. Pemerintah Desa Nyerot memutuskan memberikan bantuan modal. Sebanyak 10 kelompok usaha mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing senilai Rp10 juta.



Oliva Lopo.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)

Desain yang mendongkrak penjualan

Keterampilan mendesain secara sederhana telah membuat usaha tenun Oliva Lopo berkembang. Dengan desain promosi yang menarik, kini ia bisa menjangkau pembeli dari mana saja melalui media *online*.

Semua itu berawal dari pelatihan *digital marketing* yang diselenggarakan Konsorsium TAS sebagai bagian dari program I WIL pada pertengahan 2022 lalu. Oliva yang merupakan anggota Kelompok Perempuan Kasih di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT, dikirim untuk mengikuti pelatihan tersebut. Di dalam pelatihan itu, ia diajari cara mendesain materi promosi menggunakan aplikasi Canva.

“Saya sekarang bisa mendesain *flyer* produk saya dan anggota kelompok menggunakan aplikasi Canva dan bisa promosi secara *online*. Berbeda dengan dulu yang asal foto dan promosi, sekarang sudah bisa dengan cara yang lebih menarik,” ujarnya.

Berkat keterampilan mendesain itu, sekarang Oliva dan kelompoknya mendapatkan banyak pesanan dan memiliki jaringan pasar yang semakin luas. “Pasar baru saya ada di sekitar Kota Kupang yaitu E-MART di Oesapa, IKM FUA FUNI dan kenalan baru melalui Facebook,” tambahnya.

Sebelum mengenal metode pemasaran, Oliva merasakan betul bagaimana sulitnya menjual tenun. Sebelumnya, hasil tenunannya biasanya hanya dibeli oleh kerabat. Oleh karena itu, pembeli tenunnya sangat terbatas. Dalam satu bulan, ia hanya bisa menjual 1 lembar kain saja. Ia pernah mencoba menjual produk tenunnya ke toko oleh-oleh di Kota Kupang. Namun, ia kerap membawa pulang produknya itu karena ditolak dengan alasan masih banyak stok di toko. Akibatnya, selama masa pandemi Covid-19, kondisi ekonominya benar-benar sulit.

Kondisi itulah yang membuatnya memutuskan untuk bergabung dengan Kelompok Perempuan Kasih. Oliva diajak karena dipandang sebagai penenun muda yang akan bisa meneruskan tradisi tenun di Desa Tunfeu. Sejak bergabung dengan kelompok itulah kondisi ekonominya bisa membaik.

Menurut Oliva, pelatihan dalam program I WIL tidak hanya mengajarnya tentang desain. Ia juga belajar tentang survei pasar, pentingnya identitas label dan kemasan yang menarik, dan pentingnya standar produksi agar bisa menyesuaikan permintaan pasar. Ia juga kini bisa menghitung harga pokok produksi produk tenunnya.

Ke depan, Oliva berharap karyanya disukai banyak orang. Ia juga berharap bisa melatih perempuan muda lainnya untuk bisa menenun, sehingga bisa menjaga dan melestarikan kearifan lokal.

Mengolah pangan lokal

Ubi, labu, daun kelor, hingga seledri kini menjadi bahan pangan lokal andalan Novilia Simamora. Warga di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, itu mengolah bahan-bahan pangan lokal menjadi produk camilan yang bermutu.

Sebelum bergelut dengan bahan pangan lokal, Novilia sudah terbiasa menjual garam dan kue-kue buatan sendiri dengan menitipkannya ke kios tetangga. Usahanya tersebut tidak kunjung berkembang karena berbagai kendala. Situasinya mulai berubah ketika ia bergabung menjadi anggota Forum Perempuan Sehati. Sebagai anggota forum, ia berkesempatan mengikuti sejumlah pelatihan usaha. Salah satunya adalah pelatihan mengolah bahan pangan lokal. Di situ

ia belajar mengenali bahan-bahan makanan yang ada di sekitarnya untuk diolah menjadi produk pangan. Berbekal pengalamannya yang biasa membuat kue, ia dengan cepat menyerap materi pelatihan. Kini, ia bisa membuat stik kelor, stik ubi ungu, stik labu kuning dan stik seledri. Ia juga membuat kacang bawang, kacang sembunyi dan lain-lain.

Selain mengolah pangan lokal, ia juga belajar membuat kemasan makanan yang lebih baik agar bisa menarik minat pembeli. "Belum banyak yang tahu bahwa ada pangan lokal yang baik dan bagus untuk kita tingkatkan dengan kemasan yang lebih bagus lagi. Dulu masih pakai plastik biasa. Kalau sekarang sudah ada *standing pouch* keras," katanya.

Selanjutnya, ia juga mengikuti pelatihan tentang legalitas usaha dan bahkan dibantu untuk mengurus izin produk sampai akhirnya berhasil. Selain itu, ia dan anggota kelompok lain juga belajar tentang pemasaran. "Saya dikenalkan ke tempat-tempat yang bisa untuk menjual produk-produk saya. Ibu ketua atau ibu pendamping membawa saya untuk mencoba menawarkan di kantor-kantor, di tempat-tempat yang ramai dan di Dekranasda yang sementara ini kami titipkan. Produk saya sudah sampai di Dekranasda. Puji Tuhan berjalan dengan baik," ujarnya.

Dari beragam pelatihan itu, ia merasa telah merasakan perubahan. Kemasan



Novilia Simamora.
[Gama/Oxfam
di Indonesia]

produknya lebih menarik. Pemasarannya pun makin meluas. Seiring perubahan itu, suami yang dahulu kurang mendukung kini bahkan ikut membantu usahanya. Semula, suaminya menilai kesibukannya sebagai anggota kelompok dan produsen camilan membuat rumah tidak terurus. Namun, setelah ia beri pengertian, suaminya mendukung. “Puji Tuhan sekarang saya direstui, didukung bahwa saya bisa. Dan dia pun selalu mengantar saya untuk ikut berjalan,” ujarnya.

Selain bisa meningkatkan penghasilan, Novilia mengaku bangga bahwa produk buatannya dikenal orang. Ia berharap usahanya bisa terus maju dan produknya makin dikenal luas. Ia juga bercita-cita bisa memiliki etalase produk sendiri di dalam kios di pinggir jalan.

Pilar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Lensa



Pelatihan Digital Marketing bagi kelompok usaha perempuan di NTT. (Foto oleh Muhammad Ulum)



Kelompok Usaha Perempuan di Desa Ajaobaki sedang mengupas ubi untuk dibuat camilan. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Produk tenun Kelompok Perempuan Ainan Fen Desa Oesena, NTT. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Jamu produksi kelompok perempuan di Desa Pagutan. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Proses pembuatan shawl tenun pewarna alam Lumbung Sensek. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Produksi Stik Forum Perempuan Sehat di Desa Oebelo, NTT. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Produksi teh kelor oleh kelompok usaha perempuan Desa Oebelo. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti bersama produk desa-desa I WIL yang kini dipamerkan di NTB Mal. (Gama/Oxfam di Indonesia)

The image features a vibrant, abstract background composed of several overlapping geometric shapes. A large, irregular lime green shape dominates the center. Overlapping this are teal shapes at the top left and a large teal shape on the right that contains the text. Purple shapes are located at the top right and bottom right. Orange and maroon shapes are positioned at the bottom left. The overall aesthetic is modern and colorful.

PILAR III

MENDORONG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Pilar ketiga dalam program I WIL adalah Kepemimpinan Perempuan (*women leadership*). Pilar ini sesungguhnya adalah inti dari program I WIL itu sendiri, yakni mendorong kepemimpinan perempuan. Pilar ini menargetkan semakin banyak perempuan dan perempuan muda mempunyai akses dan kontrol yang lebih besar terhadap kepemimpinan sosial, politik dan sumber daya ekonomi, sehingga perempuan bisa setara baik di dalam konteks keluarga, komunitas, maupun publik. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan perempuan tidak bisa dilepaskan dari dua pilar lainnya.

Pendekatan komprehensif tiga pilar inilah yang menjadikan I WIL berbeda dibandingkan dengan intervensi serupa, karena terbukti isu kekerasan terhadap perempuan, keberadaan perempuan dalam ekonomi dan kepemimpinan perempuan saling terkait dan memengaruhi. Tulisan berikut memperlihatkan bagaimana proses transformasi para perempuan yang semula merasa tidak layak memimpin menjadi berani menerima tantangan dan menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh.

Perempuan Tidak Lagi Duduk Diam di Kursi Belakang

Seperti galibnya mayoritas perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewi Handayani menganggap hanya laki-laki yang bisa dan boleh jadi pemimpin. Pemimpin di ranah apa saja. Adat yang dijunjung dan dialami seumur hidup membuat keyakinan itu masih dipegangnya meski dia seorang sarjana.

Merasa tidak memiliki keterampilan menenun sama sekali, Dewi yang berasal dari Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur itu awalnya hanya ingin belajar tenun di kelompok tenun Nina Penenun. Dia tak menyangka itulah dinamika yang mengubah kesadaran hidupnya secara mendasar bermula.

“Bertemu dengan teman-teman konsorsium di Nina Penenun, lalu diajak mengikuti pelatihan kepemimpinan perempuan. Baru saya paham, ternyata perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Boleh mengorganisir teman-teman perempuan yang lain bahkan laki-laki juga,” katanya.

Pemahaman Dewi tentang peran perempuan sebagai pemimpin baik formal maupun informal sedikit banyak terbaca di Indeks Pemberdayaan Gender NTB tahun 2022 yang tercatat 52,54 dan masuk kategori rendah. Indeks ini dilihat dari keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dewi Handayani Divisi
Pemberdayaan Perempuan
LPMD Pringgasela Selatan
dan Sekretaris Kelompok
Nina Penenun. (Gama/Oxfam
di Indonesia)





Suasana diskusi saat Business Matching di Lombok pada awal 2023. Perempuan di wilayah I WIL kini lebih berani berpendapat di forum formal. (Gama/Oxfam di Indonesia)

(IPM) perempuan di NTB, yang pada tahun 2022 adalah 66,96, dibandingkan laki-laki yang 73,52.

Pemahaman laki-laki di wilayah proyek I WIL terhadap kesetaraan tentu lebih rendah. Seringnya kekerasan terhadap perempuan dan tidak adanya ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga hingga desa menjadi gambarannya.

“Itu sebabnya pada awal mengenalkan konsep dan tujuan I WIL, yang muncul bukan kesadaran tapi resistensi. Akhirnya kami coba terapkan modul-modul yang memang kita siapkan untuk melatih isu gender kepada laki-laki. Termasuk tentang berbagi peran dalam rumah tangga menyangkut pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Itu kami latihkan pada laki-laki khususnya para tokoh masyarakat,” kata Muhammad Juaini, Koordinator Konsorsium ADARA.

Desa membuka pintu

Langkah itu perlahan menunjukkan hasil. Perubahan pemahaman dan sikap mulai terjadi ketika faktor personal para tokoh tersebut dibongkar. Mereka bertransformasi dan mulai membuka ruang bagi perempuan, baik di keluarga maupun di desa.

Zainal Rahman, Sekdes Desa Sukarara, mengatakan pihaknya kini sangat mendorong keterlibatan perempuan dan memfasilitasi kelompok-kelompok perempuan dalam forum resmi. Baik dalam musyawarah dusun maupun desa misalnya, ada forum khusus perempuan agar pemerintah desa dapat menangkap aspirasi mereka tanpa terinterupsi. Perempuan pun sudah mulai mengisi posisi strategis seperti di Badan Permusyawaratan Desa.

Muhsin, Kepala Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengungkapkan hal senada. Di Batutulis, perempuan wajib diundang

Haeniyah,
Kasi Kesra
Desa
Pagutan.
(Gama/Oxfam
di Indonesia)



sebagai peserta aktif dalam setiap forum pengambilan keputusan di desa.

Dia juga mewajibkan ada unsur perempuan dalam Tim 9, tim penyusun RKPDes. Tidak tanggung-tanggung, jumlah perempuan di tim itu 4-5 orang. Tim inilah yang akan mengawal RKPDes sampai dengan eksekusi anggarannya sehingga dapat memantau apakah aspirasi perempuan yang disampaikan di awal penyusunan akan tetap terealisasi. "Perempuan sekarang tidak lagi hanya datang dan diam saat rapat-rapat," katanya.

Sikap pemerintah desa, yang mayoritas laki-laki itu, seiring dengan makin berdayanya perempuan di desa mereka. Dewi misalnya, sudah bukan lagi sosok yang menganggap hanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin. Dewi kini menjabat Divisi Pemberdayaan Perempuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sekaligus Sekretaris Kelompok Nina Penenun dan penanggung jawab sekolah tenun.

Dia selalu berkonsultasi dengan tim konsorsium agar materi pelatihan kepemimpinan yang didapatnya bisa diaplikasikan di kelompok dan diri sendiri.

Sebagai perwakilan LPMD dan Nina Penenun, dia mengusulkan beberapa program di musrenbangdes, salah satunya program sekolah tenun. Program itu disetujui untuk masuk RKPDes Desa Pringgasela Selatan 2023. "Saya merasa banyak sekali perubahan pada diri saya, percaya diri saya meningkat setelah terlibat di I WIL. Sebelumnya saya sangat jarang terlibat kegiatan desa. Sekarang malah sering diundang oleh pemerintah desa," katanya.

Sebagai aparat desa di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Haeniyah juga merasakan peningkatan kapasitas yang luar biasa setelah terlibat di aktivitas I WIL. Pelatihan sebagai fasilitator yang diterimanya membuatnya bisa lebih baik dalam mengorganisasi warga. Dia pun dilatih menyusun RPKDes secara lebih sistematis dan inklusif sebab dulu meski dia aparat desa tetapi tidak pernah tahu alur penyusunan RPKDes dan siapa yang menyusun.

"Saya merasakan betul sejak 2022 perempuan didengarkan di desa ini. Tidak disepelekan lagi seperti sebelumnya, usul apa saja tidak pernah diterima. Kemarin di RPKDes terakhir, usulan perempuan tentang bantuan modal bagi pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Pagutan Berkarya diterima dan dianggarkan Rp20 juta," kata Haeniyah yang juga paralegal desa itu.

Berugaq Nine¹

Menurut Juaini, dampak pilar *women leadership* terlihat sekali pada terbukanya akses informasi dan peningkatan peran perempuan dalam hal strategis seperti pengambilan keputusan hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Dampaknya, mereka bisa mengakses sumber daya lewat jalur-jalur politik di desa. Informasi masuk dan keluar desa juga sekarang melalui kelompok-kelompok perempuan sehingga bisa cepat menyebar ke perempuan lain.

Pemajuan perempuan di desa-desa wilayah I WIL memang tidak berhenti pada sekelompok orang yang terlibat langsung di rangkaian kegiatan proyek. Penguatan kapasitas harus lebih merata untuk menjamin keberlanjutan perubahan yang telah dirintis di desa tersebut. Salah satunya dengan membentuk wadah yang menjadi tempat berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas di segala bidang, baik di



Haiziah Gazali, Ketua Gema Alam sekaligus Women Economic Empowerment Specialist Konsorsium ADARA. (Gema/Oxfam di Indonesia)

bidang ekonomi, paralegal maupun keterampilan dasar dalam pertemuan-pertemuan desa.

“Konsep itu diwujudkan dalam Berugaq Nine. Fasilitator Berugaq Nine ini kami ambil dari perempuan-perempuan yang terlibat dalam tiga pilar di I WIL. Jadi ada paralegal, kelompok usaha, aparat desa, hingga BPD. Dukungan semua desa sudah cukup kuat, jadi kami yakin dengan keberlanjutan pilar Women Leadership ini,” kata Haiziah Gazali, Ketua Gema Alam NTB yang juga Women Economic Empowerment dan *women leadership* Specialist Konsorsium ADARA.

Sebanyak 18 perempuan dari sembilan desa menurutnya telah siap melanjutkan penyebarluasan pemahaman kesetaraan gender, keberdayaan ekonomi, dan kesadaran akan pentingnya terlibat dalam forum-forum desa. Dewi dan Haeniyah termasuk dari perempuan tersebut.

“Mungkin bisa dibilang bahwa saat ini semua perempuan yang ada di proyek I WIL adalah perempuan-perempuan yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Berani mengeluarkan pendapat untuk didengar. Dan mereka juga sudah mampu berkontribusi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan baik di rumah tangga, maupun di desa di mana mereka berada,” Susi Herawati, Project Manager Program I WIL Oxfam di Indonesia.

1 Bahasa Sasak, artinya kurang lebih tempat berkumpulnya perempuan untuk bertukar gagasan, saling belajar dan meningkatkan kapasitas

Mengakui Kepemimpinan Perempuan di Berbagai Sektor Kehidupan

Partisipasi perempuan di ranah publik khususnya di wilayah perdesaan masih sangat kurang. Akibatnya, suara perempuan umumnya tak terdengar dalam forum-forum pengambilan kebijakan yang dampaknya akan dirasakan oleh perempuan. Butuh serangkaian upaya untuk mendorong perempuan bersuara di ruang publik.

Dalam program I WIL di wilayah Nusa Tenggara Timur, upaya mendorong kepemimpinan perempuan dilakukan mula-mula dengan menelusuri faktor penghalang partisipasi perempuan. Ketimpangan gender akibat norma patriarki telah membatasi akses perempuan terhadap berbagai sumber daya sehingga membatasi langkahnya untuk muncul. Untuk itu, perlu langkah-langkah guna meretas akses perempuan terhadap sumber daya baik itu ekonomi, politik, maupun budaya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelatihan kepemimpinan perempuan. Pelatihan tersebut membekali peserta dengan pemahaman bahwa perempuan punya hak untuk memimpin, baik itu di level keluarga, lingkungan sekitar, maupun di dalam pemerintahan. Kepemimpinan perempuan penting supaya bisa

terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik baik di level desa hingga nasional, agar bisa bermanfaat bagi perempuan.

Keberanian perempuan untuk tampil di ranah publik tidak bisa dilepaskan dari rasa percaya diri yang dimiliki. Untuk itu, pelatihan yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan, bahwa mereka bisa mandiri dan berdaya di berbagai ranah kehidupan. Muara rangkaian pelatihan tersebut adalah mendorong kepemimpinan perempuan.

Berdaya secara ekonomi

Akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan salah faktor yang menghambat kepemimpinan perempuan. Ketergantungan secara ekonomi membuat perempuan sulit menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan aspek penting dalam upaya mendorong kepemimpinan perempuan.

Oliva Lopo, penenun di Desa Tunfeu, Kecamatan Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, kini mengerti bahwa



Peserta pelatihan kepemimpinan perempuan di NTT. (Foto oleh Alfes Stefanus Lopo)

perempuan bisa memimpin. Perempuan bisa melakukan dua atau tiga pekerjaan di waktu yang bersamaan, sehingga anggapan bahwa tugas perempuan hanyalah mengurus rumah dan mengasuh anak tidaklah benar. Sebagai perempuan, ia menenun agar bisa mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan keluarga sembari tetap melakukan aneka pekerjaan rumah. Bahkan ketika sedang melakukan pekerjaan rumah pun, perempuan sebenarnya sedang menjadi pemimpin di rumah.

“Secara tidak langsung, saya pribadi juga merasa sebagai pemimpin di dalam rumah tangga karena saya seorang *single parent*. Saya punya dua anak. Saya juga merasa bisa jadi pemimpin karena harus menjaga atau mendidik anak-anak saya,” katanya.

Oliva mengaku sangat bersyukur karena bisa mengikuti berbagai kegiatan dalam program I WIL sehingga bisa mendapatkan banyak pengalaman

dan mengalami perubahan positif. Secara ekonomi, penghasilannya kini meningkat. Ia merasa bisa berdiri sendiri dengan menghasilkan uang melalui pekerjaannya sebagai penenun. Menjadi berdaya secara ekonomi membuatnya menyadari bahwa sebagai perempuan, ia juga bisa menjadi pemimpin.

Marcelina Boymau yang menjadi Ketua Kelompok Perempuan Ainan Fen di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, juga merasa bahwa dengan memiliki pendapatan sendiri ia menjadi tidak tergantung sepenuhnya kepada suami bahkan bisa membantu ekonomi keluarga. Ini faktor penting yang bisa mendorong kepemimpinan perempuan. “Karena kami juga prinsip sebagai perempuan bahwa kalau bapak punya uang, kami juga harus punya uang,” ungkapnya.

Sebagai ketua kelompok usaha perempuan, Marcelina bisa melihat bahwa keberdayaan ekonomi itu dirasakan oleh seluruh anggota

Laki-laki berbagi pekerjaan domestik dengan istri, salah satunya menyapu. [Gama/Oxfam di Indonesia]



kelompok. Untuk itu, ke depan ia berharap bisa merekrut anak-anak perempuan yang putus sekolah agar bisa memiliki kegiatan ekonomi. Hal itu sudah mulai dirintis. Sejumlah remaja perempuan kini memproduksi aksesoris seperti kalung dan anting dari kain perca tenun.

Mengubah persepsi laki-laki

Selain faktor ekonomi, partisipasi perempuan juga kerap terhambat oleh pandangan bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah. Oleh karena itu, upaya mendorong kepemimpinan perempuan perlu dilakukan dengan mengubah persepsi laki-laki terhadap peran perempuan. Hal itulah yang

dilakukan melalui program Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, di mana para laki-laki diberi pemahaman tentang pembagian peran, untuk kemudian mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat, khususnya kelompok laki-laki.

Vincencius Sobe yang menjadi bagian dari kegiatan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender di Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, misalnya, melihat bahwa upaya sosialisasi tentang pembagian peran yang setara antara lelaki dan perempuan di desanya telah menunjukkan hasil. Laki-laki di sekitarnya kini banyak yang ikut membantu istri melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak lagi merasa rendah hanya karena melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menimba air, memasak, membawa anak ke posyandu, hingga mengantarkan anak ke sekolah.

Hal semacam itu diakui Lewi Yulianus Ablelo atau Om Lewi, warga Desa Oelomin. Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT. Dahulu ia tidak mau melakukan pekerjaan rumah karena itu adalah pekerjaan istri. Kondisi semacam itu perlahan berubah setelah ia mengikuti pelatihan. Pelatihan ini membuka wawasannya tentang laki-laki dan perempuan. Sepulangnya dari pelatihan itu, Om Lewi mengaku gelisah hingga tidak bisa tidur. "Ternyata selama ini tindakan saya ini tidak baik untuk keluarga," ungkapnya.

Berawal dari refleksi personal tersebut, ia memutuskan untuk mengubah sikap khususnya kepada istri, anak dan lingkungan. Suatu hari ketika pulang

dari kebun ia tidak menemukan istrinya di rumah. Rupanya, istrinya sedang mengikuti kegiatan di kantor desa dan tidak meninggalkan makanan sama sekali di rumah. Situasi semacam itu dulu bisa membuat Om Lewi murka kepada istrinya. Namun, kali ini ia tidak marah.

“Kalau saya tunggu istri berarti saya mati kelaparan, terus anak-anak gimana? Terus ya sudah, saya ambil tindakan saya masak supaya saya bisa lanjut kerja lagi. Dari situ kemudian saya mulai ubah sifat dari dalam rumah dulu,” tambahnya.

Perubahan pada para suami tersebut berdampak baik bagi pasangan mereka. Para istri bisa memiliki waktu untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan rumah, misalnya menjalankan usaha ekonomi maupun berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Perubahan persepsi akan kapasitas perempuan juga dirasakan di bidang pemerintahan. Kepala Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Obed I Kasse mengatakan, dalam forum musyawarah desa, perwakilan perempuan kini selalu diundang.

“Tidak mungkin semua perempuan di desa ini kami undang. Tetapi berapa orang yang kita undang untuk mewakili kaum perempuan dalam memberikan suaranya. Mungkin perwakilan itu juga kita harus melihat mereka yang mampu berbicara, mereka yang mampu melihat keberadaan kampung ini seperti apa. Hadirkan mereka untuk mereka bisa memberikan sumbangan

pikiran dalam forum itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, sekarang sudah semakin banyak perempuan yang tangguh dan hebat. Mereka mampu berkontribusi bagi masyarakat. Untuk itu, perempuan dengan kemampuan tersebut perlu diakomodasi agar dapat berkontribusi bagi desa. Saat ini menurutnya di Desa Ajaobaki kepemimpinan perempuan sudah sangat tampak. Di bidang keagamaan, dua dari empat pemimpin jemaat adalah perempuan. Di sektor pemerintahan, perempuan menduduki posisi kepala seksi, kepala urusan dan sekretaris desa. Ada juga perempuan yang menjadi Ketua Rukun Tetangga.

“Hanya untuk perlindungan masyarakat, belum ada yang perempuan. Tapi di desa tetangga sudah ada perlindungan masyarakat yang perempuan. Artinya mereka juga tidak dipandang dengan sebelah mata tetapi kita melihat mereka sebagai orang-orang yang hebat di desa,” tambahnya.



Obed I
Kasse,
Kepala
Desa
Ajaobaki.
(Gama/
Oxfam di
Indonesia)



Kegiatan asistensi Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender, Desa Maubesi. (Foto oleh Stefanus Kou)



Kegiatan Kelompok Perempuan Ainan Fen di Desa Oesena. (Gama/Oxfam di Indonesia)

Bangkit Memimpin dari Keterpurukan

Sempat terpuruk karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, Besa atau Mama Yuli tidak mau larut dalam kesedihan. Orang tua tunggal dengan dua anak di Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bangkit lalu menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Melihat kemampuannya, ia pun dipercaya sebagai kepala dusun oleh Pemerintah Desa Kuanek.

Perempuan yang menjadi kepala dusun (Kadus) belumlah menjadi hal yang lumrah di NTT. Namun, Mama Yuli menghapus keraguan akan kepemimpinan perempuan. Ia menjadi Kepala Dusun I yang membawahi dua rukun tetangga (RT) dengan 37 kepala keluarga yang terdiri dari 63 laki-laki dan 54 perempuan. Ketika terpilih menjadi kepala dusun, ia merasa situasinya bagaikan “bulan jatuh ke pangkuan”.

“Awal mulanya saya merasa berat karena apa yang saya harus buat sebagai kepala dusun dan bagaimana dengan penilaian masyarakat tentang masa lalu saya?” katanya.

Namun, dukungan keluarga, pemerintah desa, masyarakat dan teman-temannya menjadi sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk kuat dan berani.

Sebelum menjadi kepala dusun, Mama Yuli adalah ibu rumah tangga. Sehari-hari, ia fokus mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh dua anaknya. Pada 2018, suaminya pergi meninggalkan rumah. Di tengah dampak dari kekerasan psikologis dan ekonomi akibat keputusan mantan suaminya itu, Mama Yuli harus berjuang membesarkan dua anak sendirian. “Saya adalah korban tindak kekerasan yakni korban ingkar janji menikah (IJM),” ungkapnya sambil mengunyah sirih-pinang kesukaannya.

Untuk melupakan kesedihannya, Mama Yuli sering bertemu dengan teman-temannya guna sekadar berbagi tentang apa yang ia rasakan. Selain itu, ia juga menyibukkan diri dengan aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan.

Pada awal 2020, Mama Yuli diundang oleh Pemerintah Desa Kuanek untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang kekerasan berbasis gender, pemberdayaan ekonomi perempuan

dan kepemimpinan perempuan. Diskusi tersebut difasilitasi oleh Konsorsium TAS melalui lembaga YABIKU NTT dalam program I WIL. Diskusi itu membuka mata Mama Yuli tentang berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan beragam upaya yang bisa dilakukan untuk menghapus kekerasan. Tak hanya itu, ia juga mendapat pengetahuan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepemimpinan perempuan.

Pengetahuan baru yang ia peroleh dari diskusi itu membuat Mama Yuli mulai berani dan keluar dari keterpurukannya. Ia semakin aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pada Maret 2020, Mama Yuli dipilih oleh Pemerintah Desa Kuanek sebagai satu dari delapan kadus di desa tersebut.

Pada akhir 2021, Mama Yuli mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Konsorsium TAS. Dalam pelatihan itu, ia mendapat pengetahuan tentang cara mengidentifikasi kasus kekerasan, melakukan konseling kepada korban, mendampingi korban dan merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan. Pelatihan tersebut membuatnya merasa terpanggil untuk menjadi paralegal agar bisa mendampingi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di desanya.

Dengan menjadi Kadus sekaligus paralegal, Mama Yuli mengaku ingin terus berjuang bersama perempuan untuk menolong sesama perempuan yang menjadi korban kekerasan agar keluar dari belenggu ketertindasannya. Ia akan terus mendorong perempuan di desanya untuk berani bicara.

Melanjutkan cita-cita yang sempat terputus

Terpaksa menjalani pernikahan saat usianya 16 tahun dan masih duduk di kelas 3 MTs membuat Indrawati [31] sempat menjadi perempuan yang apatis. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak pernah terlibat kegiatan desa, bahkan di rumah pun lebih banyak diam. Apalagi memang ruang untuk berbicara bagi perempuan sangat terbatas. Tak berani membayangkan masa depan yang menantinya, saat melihat teman-temannya masih riang bersekolah sementara dia telah berstatus ibu rumah tangga.

“Penyesalannya panjang,” kata warga Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur itu.

Sebelum proyek I WIL berjalan, saat pertama kali ikut pelatihan bersama Gema Alam, anggota Konsorsium ADARA, dilakukannya dengan diam-diam. Toh, karena kegiatan tersebut berlanjut dengan kegiatan berikutnya, Indra tetap meminta izin pada suaminya. Tanpa diduga sang suami tidak mempermasalahkannya, malah mendorong ikut kegiatan serupa meski dengan banyak pembatasan. Sikap yang jarang dimiliki seorang suami di desanya.

“Mungkin karena secara umur dia sudah cukup. Jadi meskipun pelaku pernikahan anak tetapi masih punya kesadaran untuk membiarkan saya mengikuti beberapa kegiatan,’ tambahna.

Indrawati kemudian makin sering terlibat kegiatan dan menjadi kader posyandu.



Indrawati. (Gama/Oxfam di Indonesia)

Ketika itulah dia mulai mempraktikkan berbicara di depan umum sedikit demi sedikit. Akhirnya dia dipilih sebagai Ketua Forum Kader Desa Jurit Baru.

Namun, kegelisahan kembali datang saat makin paham bahwa yang dialami dan dijalani perempuan di desanya selama ini adalah bentuk ketidakadilan gender sekaligus keterpurukan perempuan. Bedanya, kini dia lebih yakin dan berani memberi penjelasan pada suami, yang mulai mengeluh dengan tema-tema kesetaraan gender dalam pelatihan yang diadakan konsorsium. Secara konsisten dan perlahan Indra

terus mengomunikasikan materi yang dia terima secara langsung pada sang suami.

“Akhirnya dia pun berubah. Dari yang semula hanya mengizinkan kegiatan, menjadi mau berbagi pekerjaan rumah tangga hingga akhirnya dia mau ikut kegiatan Laki-Laki Pendukung Kesetaraan Gender,” ujarnya.

Di sisi lain, keaktifannya mengikuti kegiatan desa membuat Indra ditunjuk menjadi Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Demikian juga di organisasi PKK, dia dipilih sebagai

bendahara. Dia juga pengurus Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif Desa Jurit Baru sampai sekarang.

Perkembangan luar biasa itu sebagai dampak dari kepercayaan diri Indrawati yang meningkat drastis. Dia lantas mengungkapkan mimpinya melanjutkan pendidikan pada sang suami dan mendapat lampu hijau. Pendidikannya semula yang tak sampai tamat MTs yang sederajat SMP. Tetapi saat ini, Indrawati mantap menjalani kuliah di Jurusan Akuntansi di salah satu universitas di Lombok Timur, jurusan yang sesuai dengan bidang-bidang yang dia tekuni sekarang. Kepedulianya terhadap pendidikan perempuan juga menjadi bagian yang dikampanyekan ke sekitarnya.

Satu-satunya perempuan

Pengalaman serupa dialami Suhaeniyah, warga Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Minimnya kapasitas dan asupan informasi membuat kepercayaan dirinya tergerus. Alhasil, meski dirinya adalah kader perempuan di desa, tetapi lebih sebagai formalitas. Tidak ada ruang pengembangan kapasitas apalagi kesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan penting.

Bersamaan dengan keterlibatan di kegiatan I WIL, Suhaeniyah bergabung dengan Patuh Angen, kelompok perempuan yang konsentrasinya pada pemberdayaan ekonomi. Dua hal itulah

yang kemudian membuat kapasitasnya mulai meningkat. Dampaknya, dia tidak lagi minder dan ragu untuk terlibat aktif dalam kegiatan desa.

Dia lalu dipercaya sebagai Sekretaris Kelompok Patuh Angen. Dan kemudian, terpilihlah Suhaeniyah sebagai satu-satunya perempuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keterpilihan dia tersebut terbukti sangat menguntungkan perempuan di desanya, dalam konteks akses informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan termasuk soal anggaran desa. Mulai timbul kesadaran di pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan perempuan terutama di sektor ekonomi.

Selain anggota BPD, Suhaeniyah juga menjadi paralegal. Perannya berkomunikasi dengan aparat desa dalam penyelesaian masalah sejauh ini dijalankan dengan baik.

“Terbukti kondisi desa jauh lebih baik jika perempuan lebih mudah mengakses sumber daya di desa terutama terkait pemberdayaan ekonomi, sebab ujungnya bergulir menuju kesejahteraan warga desa secara umum,” katanya.

Memimpin kelompok usaha perempuan

Kepemimpinan perempuan juga berlangsung di ranah ekonomi. Inilah yang bisa dilihat dalam diri Marcelina Boymau, warga Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT.



Marcelina Boymau.
(Gama/Oxfam di
Indonesia)

Keahlian menenun tidak lantas membuat Marcelina Boymau bisa mendapatkan pemasukan dengan mudah. Ia baru mulai merasakan hasil dari menenun setelah bergabung dengan kelompok tenun di desanya.

Seperti penenun lain di desanya, perempuan yang biasa dipanggil Mama Sherly ini menyebut bahwa dahulu menenun baginya adalah pekerjaan sambilan yang dilakukan di waktu luang, misalnya setelah masa kerja di kebun sudah selesai. Kondisi itu perlahan berubah ketika ada pembentukan

kelompok tenun yang difasilitasi Konsorsium TAS. Dalam pembentukan kelompok itu, para penenun dikumpulkan lalu diberi pelatihan-pelatihan. Keahlian dan pengalamannya kemudian membuatnya dipilih menjadi Ketua Kelompok Perempuan Ainan Fen.

Ada sejumlah pelatihan yang ia ikuti dalam rangkaian program I WIL, yakni pengelolaan keuangan, administrasi, menghitung harga pokok produksi, pembuatan label hingga pemasaran. Selain itu, ia juga mendapat pelatihan tentang kepemimpinan

perempuan. Pelatihan-pelatihan tersebut sangat berguna bagi dirinya yang menjadi ketua kelompok.

“Setelah dibentuknya kelompok tenun, ada banyak perubahan yang terjadi. Menyangkut dengan hasil penjualan, kalau dulu kami hanya menjual kain tenun hanya sekedar dapat uang, tetapi sekarang kami mendapat pelatihan-pelatihan,” tuturnya.

Perubahan itu membuat dirinya dan para penenun semakin rajin sehingga menenun bukan lagi sekedar pekerjaan sampingan ataupun musiman. Mereka menjadi bersemangat karena mengetahui bahwa produk tenunnya kini bisa cepat dijual. Jumlah produksi tenun pun meningkat. Selain tenun hasil karya kelompok, ada juga kain tenun lain dari nonanggota yang dijual pembuatnya ke kelompok. Hal ini tidak lepas dari perubahan pola penjualan produk tenun yang kini didukung dengan strategi pemasaran.

Mama Sherly memimpin anggota kelompok lainnya untuk menerapkan berbagai cara untuk memperluas pasar. Mulai dari metode menyebar informasi produk dari mulut ke mulut hingga memanfaatkan media sosial dengan menyasar warga Kupang maupun daerah lain. Dalam satu bulan, mereka bisa menjual hingga 10 lembar kain tenun.

Hasil penjualan kain kemudian diberikan kepada para penenun yang produknnya laku terjual. Namun, ada potongan sebesar Rp 5.000 untuk setiap lembar kain yang terjual guna menambah kas kelompok.

“Manfaatnya sangat bagus. Karena di sisi lain, kami bisa membantu ekonomi keluarga. Tidak tergantung sepenuhnya pada suami,” ujarnya.

Sebagai ketua kelompok, target Mama Sherly ke depan adalah menggaet anak perempuan yang putus sekolah menjadi penenun sehingga bisa mengasah keterampilan sekaligus mendapat penghasilan. Mereka akan digabungkan ke dalam kelompok anak-anak. Sejauh ini, sudah ada empat anak yang bergabung. Mereka bertugas membuat aksesoris berbahan kain perca tenun, antara lain berupa kalung dan anting-anting. “Kami baru bergerak di bagian kalung dan anting. Kami berharap bisa ada produk turunan lain yang bisa diajarkan,” tambahnya.

Pilar Kepimpinan Perempuan dalam Lensa



Baiq Anggita, paralegal dari Desa Pagutan kini sudah berani dan mampu memimpin diskusi. (Foto oleh Baskara Qazuwani Karim)



Diskusi perempuan dalam sesi pelatihan tentang kepemimpinan perempuan di NTT. (Gama/Oxfam di Indonesia)



Diskusi perempuan dalam sesi pelatihan tentang kepemimpinan perempuan di NTT. (Foto oleh Stefanus Kou)

Menguatkan Keberlanjutan untuk Menata Langkah Selanjutnya

Coba tengok sejenak fakta-fakta ini. Seluruh wilayah proyek I WIL di NTB, yaitu sembilan desa, telah mengesahkan Perdes Perlindungan Perempuan & Anak. Kesembilan desa tersebut, ditambah 10 desa lain di NTT, telah memiliki SOP penanganan kasus penghapusan *gender based violence* dan SK Kepala Desa tentang paralegal. Sementara lima dari 21 desa tersebut telah berkomitmen mengalokasikan dana operasional desa untuk paralegal dan perlindungan perempuan dan anak. Itu bukanlah sekadar angka, melainkan gambaran bagaimana I WIL membuka jalan menuju keberlanjutan.

Keberlanjutan atau *sustainability* menjadi jargon yang menghantui proyek-proyek pemberdayaan. Memastikan keberlanjutan proyek pemberdayaan tidaklah mudah. Butuh rancangan serius sejak awal yang terus dipantau perkembangannya selama masa proyek; butuh energi, upaya dan komitmen ekstra. Namun itulah esensi pemberdayaan, yaitu saat akhirnya komunitas yang sebelumnya mesti

didampingi dapat mandiri, atau bahkan menjadi rujukan replikasi. Dan proyek I WIL membuktikan itu semua.

Salah satu kunci keberhasilan I WIL adalah rancangannya yang komprehensif melalui strategi tiga pilar. Selama lima tahun, I WIL secara bertahap menysasar tiga level perubahan agar bisa membangun fondasi keberlanjutan. Perubahan di level individual dan komunitas didorong dengan mengejar peningkatan kesadaran, pemahaman, kapasitas dan implementasi untuk kemudian mendapatkan komitmen. Baru di level akhir yaitu mekanisme, diharapkan telah ada perubahan sistem dan kebijakan.

Pilar penghapusan *gender based violence* dianggap yang paling tuntas mencapai ketiga level tersebut. Sedangkan pilar *women economic empowerment* dan *women leadership*, meskipun secara capaian sudah sedemikian banyak namun terbangunnya sistem dan kebijakan formal masih butuh langkah lanjutan.

Inisiatif dan kelompok yang sudah tumbuh di desa-desa terkait dua pilar tersebut perlu dikoordinasikan agar visinya jelas dan selaras. Misalnya terkait usulan-usulan dalam musrenbangdes. Demikian juga dengan aktor yang dapat menyediakan informasi bagi kelompok *women economic empowerment*. Dengan adanya aktor-aktor kunci dan mekanisme serta sistem yang kuat, dampak pilar-pilar ini akan lebih nyata dan meluas.

Tak goyang diterjang tantangan

Capaian sekaligus jalan menuju keberlanjutan yang mantap diraih itu jelas tidak melalui proses yang mudah dan lancar. Masyarakat di wilayah-wilayah I WIL sudah memiliki akar kuat selama sekian lama terkait posisi perempuan, sehingga ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sama sekali bukan isu favorit apalagi dibawa oleh pihak luar. Mereka bahkan tidak menganggap ada masalah dengan pola pikir dan pola laku yang ada, justru yang berusaha mengubahlah yang dianggap biang masalah.

“Saya ingat betul pada dua tahun pertama, kedatangan kami dianggap menentang adat dan agama sehingga sempat mau diusir ketika berkegiatan

sampai dituduh membawa misi agama tertentu,” kata Muhammad Juani, Koordinator Konsorsium ADARA.

Namun, karena yakin yang dibawa adalah perubahan menuju kebaikan, maka tim program malah merangkul para tokoh adat dan agama alih-alih berseteru pendapat tanpa henti. Setelah proses bertahap selama setahun, maka mulailah terlihat hasilnya di tahun ketiga. Situasi berbalik dengan makin banyaknya para tokoh yang berubah cara pandangya dan justru kemudian mendukung misi I WIL.

Persoalan adat yang mengakar bukan menjadi satu-satunya tantangan. Datangnya pandemi Covid-19 di saat konsolidasi internal mulai padu benar-benar menguji kemampuan tim dalam bersiasat, mengantisipasi, tetapi juga tetap menjaga misi. Sebab tidak mudah bagi siapa pun menjalankan proyek pemberdayaan warga ketika pembatasan sosial ketat diberlakukan saat pandemi. Apalagi daruratnya situasi juga membuat munculnya permintaan realokasi dana untuk merespons Covid-19.

Tidak berhenti di situ, Badai Seroja yang menghantam NTT pada 2021 membuat beberapa desa lokasi proyek terkena dampaknya dan secara umum membuat mitra Oxfam menunda beberapa kegiatan karena lebih dari dua minggu

tidak ada aliran listrik di seluruh Pulau Timor.

“Mitra I WIL ini bagi saya luar biasa. Saya banyak belajar dari mereka. Mereka memang *expert*. Pahami dengan apa yang mereka lakukan terutama saat menghadapi tantangan-tantangan itu,” kata Susi Herawati, Project Manager Program I WIL Oxfam di Indonesia.

Asesmen yang lebih detail

Selain tantangan yang berasal dari luar, secara internal di pelaksana program juga terjadi beberapa hal yang sempat memperlambat pencapaian target. Contohnya pembuatan aplikasi untuk sistem rujukan daring yang dinilai tidak efektif, antara lain karena tidak kompatibel dengan sistem data di desa. Padahal ternyata, sudah ada sistem serupa oleh pemerintah yang terintegrasi dari level desa hingga nasional yaitu SIMFONI.

Strategi pun segera diubah. Paralegal dilatih untuk penggunaannya, dan perangkat pemerintah lokal sebagai pengelola dikuatkan kapasitasnya. Hasilnya adalah landasan yang lebih kuat bagi keberlanjutan pilar Penghapusan *Gender Based Violence* karena mekanisme yang telah terbangun dan terhubung dari level desa sampai nasional. Setelah paralegal dapat langsung memasukkan

data ke SIMFONI, data kasus pun meningkat dan berdampak pada keputusan pemerintah menganggarkan Dana Alokasi Khusus bagi UPTD PPA Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk penanganan kasus Penghapusan *Gender Based Violence*, misalnya mendirikan rumah aman.

Sedangkan terkait intervensi dan pelibatan kelompok disabilitas, meski menjadi capaian luar biasa di luar target, namun diakui bila digarap bersamaan sejak awal bisa membawa dampak yang lebih besar.

Keberlanjutan dan peluang

Beberapa kunci pintu keberlanjutan telah dibuka oleh I WIL. *Pertama*, adanya kolaborasi dengan aktor lain di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya untuk pilar Penghapusan *Gender Based Violence* dengan LBH, kemenkumham, dinas kabupaten, dan kepolisian setempat, juga dengan aktor lokal lainnya seperti gereja, karang taruna, hingga Rukun Tetangga (RT). *Kedua*, munculnya kebijakan formal sebagai payung gerakan Penghapusan *Gender Based Violence* sehingga tidak lagi bergantung pada aktor individu tertentu. Dan *ketiga*, terjalinnya relasi dengan penyedia akses pelatihan, pemasaran, dan pendanaan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan.

Tentu I WIL tidak dimaksudkan, dan tidak realistis, untuk menyelesaikan segala persoalan kesetaraan gender di NTB dan NTT dengan lima tahun perjalanannya. Masih banyak langkah yang bisa dilakukan untuk memperluas dan menguatkan dampak, tidak hanya di 21 desa lokasi proyek.

Ada beberapa program lanjutan yang diidentifikasi Oxfam bersama mitra pelaksana I WIL. Pertama, pengembangan strategi advokasi yang spesifik untuk LSM lokal. Berikutnya adalah pengembangan strategi inklusi disabilitas. Lalu mendesain proyek yang melibatkan lebih banyak anak dan kaum muda sebagai subjek intervensi pencegahan Penghapusan *Gender Based Violence*.

Bisnis inklusif

Model bisnis inklusif merupakan bisnis yang dikelola oleh perempuan dari berbagai latar belakang termasuk penyintas, penyandang disabilitas, perempuan muda dan mantan TKW (Tenaga Kerja Wanita). Dalam model bisnis ini, perempuan terhubung dengan ekosistem bisnis yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, universitas dan jejaring lainnya yang mendukung pengembangan dan proses bisnis. Ekosistem bisnis inklusif memberikan akses kepada perempuan untuk memanfaatkan potensi lokal desa yang dikelola serta mengontrol

setiap bagian di rantai nilai bisnis mulai dari input, produksi, proses pembuatan, pemasaran sampai ke konsumen.

Desa-desa wilayah I WIL memiliki produk kewirausahaan sosial yang beragam. Sejauh ini memang baru Desa Sukarara dan Jurit Baru di NTB-lah yang sudah mulai berjalan menjadi percontohan bisnis inklusif. Setelah kuat di bisnis intinya yaitu tenun dan gula semut, dua kelompok perempuan di desa tersebut membuka diri sekaligus membangun ekosistem yang lebih terbuka bagi keterlibatan perempuan di luar kelompok. Mereka adalah Kelompok Tenun Lumbung Sensek di Desa Sukarara dan Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif di Desa Jurit Baru.

Itu sebabnya di Jurit Baru muncul Kampung Aren sebagai hulu dan Warung KPKK di jalur pendakian Gunung Kukus sebagai hilir. Sedangkan di Sukarara dirancang realisasi Wisata Tenun Lumbung Sensek. Bisnis inklusif inilah yang menjadi modal bagi keberlanjutan gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah I WIL sebab memungkinkan makin banyak orang untuk saling terhubung dan mendukung.

Model yang dirintis di kedua desa itulah yang kelak akan didorong di desa lain yang menjadi wilayah I WIL. Bisnis yang dikembangkan berpijak dari potensi yang dimiliki oleh para perempuan

itu, dari sumber daya yang ada di desa mereka. Makin banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis yang dibangun oleh kelompok perempuan di desa, makin luas ekonomi bergulir, dan makin kuat pula fondasi dan penopang keberlanjutannya seperti misalnya dukungan dari pemerintah desa.

“Pemerintah desa Sukarara berkomitmen menyediakan lahan untuk bisnis inklusif kurang lebih 25 are. Nanti akan menjadi pusat semua kegiatan Lumbung Sensek mulai dari proses penanaman kapas, penanaman pohon pewarna alam, pemintalan benang, penenunan, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan produksi tenun. Kami juga mendukung dalam bentuk bantuan modal melalui BUMDes,” kata Zainal Rahman, Sekdes Sukarara.

Proyek I WIL memang telah berakhir. Namun, selain jejaknya yang terbukti membekas kuat di komunitas, masih ada ruang dan peluang melanjutkan langkah-langkah untuk menuju tujuan yang besar: pemberdayaan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan hak dan harkatnya.

PESAN DARI MITRA



“Dedikasi I WIL memberi pembelajaran penting bagi Konsorsium ADARA, Gema Alam dan LBH APIK NTB, mitra di desa hingga *stakeholders* kabupaten dan provinsi. Pendekatan inklusif dalam penghapusan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan lebih efektif karena dukungan laki-laki. I WIL juga telah melahirkan dua desa bisnis inklusif: Desa Sukarara dengan potensi tenun merintis ‘Ekowisata Tenun’ dan Desa Jurit Baru dengan potensi aren merintis ‘Kampung Aren’. Desa bisnis inklusif membuat perempuan dan penyandang disabilitas memiliki akses dan kontrol langsung pada rantai nilai yang bermuara pada terbangunnya ekosistem bisnis. Berbagai capaian diramu untuk pelaporan SDG’s. Lima tahun telah memberi pengalaman penting dalam berinteraksi. Ini penting disebarluaskan sehingga bermanfaat lebih luas.

Pertengahan 2023 ini proyek berakhir. Tetapi proses dan capaian baik tidak boleh ikut berakhir. Untuk memastikan ini, Konsorsium ADARA mengajak para *stakeholders* kunci mengidentifikasi semua capaian dan menyusun strategi keberlanjutan sesuai kapasitas masing-masing.”

Muhammad Juaini

Koordinator Konsorsium ADARA, NTB

“Upaya mendukung pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam mempromosikan nilai kesetaraan gender dengan melakukan upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan, penguatan ekonomi perempuan, dan promosi partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di wilayah timur Indonesia melalui project I WIL adalah langkah strategis Oxfam yang patut diapresiasi. Selama 5 tahun, Project I WIL telah bekerja untuk mengubah nilai sosial dan gender yang selama ini tidak mendukung terwujudnya kesetaraan, memperbaiki layanan akses hukum kepada perempuan dan anak perempuan serta kelompok disabilitas yang menjadi korban kekerasan. I WIL juga telah mendorong terjadinya perubahan sehingga perempuan memiliki akses yang luas untuk mengendalikan sumber daya dan peluang ekonomi yang meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menambah keterwakilan perempuan dalam politik dan peran peran kepemimpinan di tingkat masyarakat dan desa. Berharap project I WIL ini bisa direplikasi di wilayah lainnya.”



Ansy Damaris Rihidara

Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Setara, NTT

“Proyek I WIL dengan tiga kekuatan pilar isunya yaitu menghapus kekerasan berbasis gender, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepemimpinan perempuan telah memberikan fakta, data dan informasi tentang kiprah serta perjuangan perempuan dalam memastikan hak-haknya terpenuhi dalam pembangunan di tingkat desa. Strategi pelibatan laki-laki dalam implementasi proyek I WIL menjadi sebuah strategi yang tepat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih setara dan adil. Capaian Proyek I WIL juga telah berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa khususnya di *goal* 1, 5 dan 8. Capaian SDGs Desa berkontribusi besar pada capai SDGs Nasional.”



Listyowati

Ketua Kalyanamitra, Jakarta

Connect

Instagram: [oxfandiindonesia](#)

Facebook: [Facebook.com/Oxfam.Indonesia](#)

Twitter: [@OxfamIndonesia](#)

Website: [indonesia.oxfam.org](#)

Contact

E-mail: [www.oxfam.uk/indonesia](#)

Phone: +62-21-781 1827

Address: Jl. Taman Margasatwa No. 26A,
Jakarta 12550, Indonesia

Foto sampul: Baskara Qazuaini Karim, Muhammad Ulum,
Gama/Oxfam di Indonesia

Penulis: Idha Saraswati, Imung Yuniardi

Desainer: Amarawati Ayuningtyas

Copyright © Oxfam in Indonesia



Lopo Belajar Gender